LAPORAN *ASSESSMENT* PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI PT SARINAH (PERSERO) TAHUN 2014

Disclaimer

Assessment penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) periode tahun 2014 dilakukan oleh Trisakti Governance Center ('Konsultan') selaku *assessor* independen berdasarkan Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment Good Corporate Governance* dari Kementerian BUMN. *Assessment* penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) semata-mata berdasarkan dokumen yang disediakan oleh PT Sarinah (Persero), kuesioner, dan hasil wawancara hingga laporan ini diterbitkan.

Laporan hasil *assessment* ini dimaksudkan dalam rangka pengungkapan praktik penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) sesuai dengan metodologi terpakai. Laporan ini tidak dapat dianggap sebagai saran dan/atau rekomendasi bagi Pihak Ketiga untuk merencanakan dan/atau melakukan hubungan usaha dengan PT Sarinah (Persero). Konsultan menjamin tingkat objektivitas dan independensi dari laporan ini dan tidak mendapat campur tangan dan/atau permintaan dan/atau tekanan dan/atau paksaan dari pihak mana pun juga.

Penggunaan atas laporan ini selain yang ditujukan bagi PT Sarinah (Persero) adalah selalu mendapatkan ijin tertulis dari Konsultan.

TRISAKTI GOVERNANCE CENTER
Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti
Kampus A, Gedung S Lantai 5, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta
Telp. (0882) 11863979, Faks. (021) 5644270

Jakarta, 14 September 2015

Kepada Yth.
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Sarinah (Persero)
Jalan MH Thamrin No. 11
Jakarta

Hasil *Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance*

Kami telah melakukan penilaian terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Sarinah (Persero) periode tahun 2014. Penilaian kami lakukan dengan menggunakan metodologi *assessment* sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* GCG yang digunakan oleh Kementerian BUMN.

Berdasarkan metodologi *assessment* tersebut, kami mendapatkan keyakinan bahwa PT Sarinah (Persero) telah memiliki kecukupan sistem dan infrastruktur yang mendukung implementasi prinsip-prinsip GCG. Pencapaian nilai (*score*) PT Sarinah (Persero) adalah **86,983** atau mencapai kualifikasi **SANGAT BAIK.** Namun demikian, upaya yang sungguh-sungguh dalam menindaklanjuti rekomendasi yang kami sajikan diharapkan akan semakin memperkecil *gap* dengan standar atau praktik terbaik *(best practice)* penerapan GCG.

Hasil pencapaian nilai penerapan GCG berdasarkan Aspek Pengujian adalah:

1.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	6,696
2.	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	8,812
3.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	32,047
4.	Direksi	33,351
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	6,077
6.	Aspek Lainnya	0,000
	Total Nilai	**86,983**

Secara lengkap, hasil *assessment* kami sajikan dalam Laporan *Assessment* Penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) Tahun 2014.

Trisakti Governance Center

TRISAKTI GOVERNANCE CENTER FAKULTAS EKONOMI

Deni Darmawati, SE, Ak, CA, MSi
Ketua

DAFTAR ISI

	Hal
Ringkasan Eksekutif	1
Simpulan dan Rekomendasi	3
Profil Perusahaan dan Metodologi	17
Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG	24
Daftar Capaian Penerapan GCG Per Indikator	271
Daftar Usulan Rekomendasi	280

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kami telah melakukan *asssessment* penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* GCG yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN. Ruang lingkup *assessment* meliputi aspek-aspek GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk periode tahun 2014.
Tujuan pelaksanaan *assessment* penerapan GCG ini adalah untuk:

a. Mengukur kualitas penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) melalui penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di PT Sarinah (Persero), melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG-nya;
b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di PT Sarinah (Persero), serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG di PT Sarinah (Persero);
c. Memonitor konsistensi penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* di lingkungan PT Sarinah (Persero).

Periode penerapan GCG yang dinilai dalam *assessment* ini adalah periode tahun 2014. *Assessment* dilaksanakan mulai tanggal 27 Juli – 14 September 2015.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan infrastruktur GCG yang ada merupakan tanggung jawab Manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada hasil penilaian atas penerapan GCG tersebut sesuai kerangka acuan *assessment*.

Pelaksanaan *assessment* penerapan GCG ini merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di PT Sarinah (Persero), sehingga hasil *assessment* ini sekaligus penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG selama ini. Secara metodologis, pelaksanaan *assessment* GCG di Perusahaan mengacu pada Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* dan *Re-assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* di BUMN yang dikembangkan Kementerian BUMN tahun 2012.

Aspek atau faktor pengujian penerapan GCG di PT Sarinah (Persero), meliputi: (a) Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan; (b) Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal; (c) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (d) Direksi; (e) Pengungkapan Informasi dan Transparansi, serta (f) Aspek Lain. Sedangkan, jumlah indikator pengujian penerapan GCG adalah sebanyak 43 indikator dengan 153 parameter pengujian.

Hasil *assessment* penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) tahun 2014 mencapai total skor sebesar **86,983.** Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) pada tahun 2014 telah mencapai kualifikasi **SANGAT BAIK.**

Selanjutnya hasil *assessment* penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) tahun 2014 dapat diikhtisarkan sebagai berikut.

ASPEK		BOBOT	SKOR	% CAPAIAN
I.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,000	6,696	95,65%
II.	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,000	8,812	97,92%
III.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,000	32,047	91,55%
IV.	Direksi	35,000	33,351	95,29%
V.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,000	6,077	67,53%
VI.	Aspek Lain	5,000	0,000	0,00%
	Skor Keseluruhan	**100,000**	**86,983**	**86,98%**
Peringkat Kualitas Penerapan GCG		**SANGAT BAIK**		

Tabel di atas menggambarkan perbandingan antara kondisi penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) dengan praktik terbaik penerapan GCG. Beberapa aspek penilaian telah mendekati standar dan *best practice*, namun pada area tertentu masih memerlukan peningkatan.

Secara lengkap, hasil *asessment* kami sajikan dalam Laporan *Assessment* Penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) Tahun 2014.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Kami telah melakukan *asssessment* penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* GCG yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN. Ruang lingkup *assessment* meliputi aspek-aspek GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk periode tahun 2014.

Hasil *assessment* penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) periode tahun 2014 mencapai Total Skor sebesar **86,983.** Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) periode tahun 2014 telah mencapai kualifikasi **SANGAT BAIK.**

Berikut ini disajikan simpulan hasil *assessment*, yang diuraikan untuk setiap aspek pengujian sebagai berikut.

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahan yang Baik Secara Berkelanjutan

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan, skor yang dicapai adalah **6,696** dari bobot sebesar **7,000** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **95,65%.** Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahan yang Baik Secara Berkelanjutan telah berjalan dengan sangat baik. Beberapa praktik yang telah berjalan adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
2. Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku secara cukup konsisten. Hal ini ditunjukkan melalui:
   a. Terdapat seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG yang melaporkan pelaksanaan GCG tersebut kepada Pemilik Modal dan Dewan Komisaris;
   b. Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku.
3. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG yang di*review* secara berkala dan menjadi salah satu unsur *Key Performance Indicator* (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen.
4. Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini ditunjukkan melalui kebijakan perusahaan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi;
5. Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan melalui:
   a. Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi;
   b. Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan pengendalian gratifikasi;

   c. Perusahaan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
6. Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (*whistleblowing system*). Hal ini ditunjukkan melalui:
   a. Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (*whistleblowing system*);
   b. Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (*whistleblowing system*);
   c. Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (*whistleblowing system*).

Namun demikian masih terdapat kondisi penerapan GCG untuk Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan yang masih memerlukan perhatian sebagai *area of improvement*, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan LHKPN masih belum sesuai harapan. Berdasarkan Ringkasan Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara PT Sarinah (Persero) sampai dengan Maret 2015 sebanyak 86,36% dari jumlah yang wajib lapor belum melaporkan LHKPN.

2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, skor yang dicapai adalah **8,812** dari bobot sebesar **9,000** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **97,92%** yang berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat diketahui dari beberapa praktik yang telah berjalan sebagai berikut.

1. Pemegang Saham telah menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
2. Pemegang Saham telah melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi.
3. Pemegang Saham telah menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi.
4. Pemegang Saham telah menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi.
5. Pemegang Saham telah memiliki mekanisme pemberhentian anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pemegang Saham telah memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris.
7. Pemegang Saham telah melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris.
8. Pemegang Saham telah menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris.
9. Pemegang Saham telah memiliki mekanisme pemberhentian anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Saham telah memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

11. Pemegang Saham telah memberikan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
12. Pemegang Saham telah memberikan persetujuan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham.
13. RUPS telah menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
14. Pemegang Saham telah menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan.
15. Pemegang Saham telah memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, serta tugas pengawasan Dewan Komisaris.
16. Pemegang Saham telah menetapkan penggunaan laba bersih.
17. RUPS telah melakukan pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu.
18. RUPS telah mengambil keputusan sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.
19. RUPS telah mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.
20. Pemegang Saham telah memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
21. Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.
22. Pemegang Saham merespon informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian Perusahaan yang signifikan.

Namun demikian masih terdapat kondisi penerapan GCG untuk Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal yang masih memerlukan perhatian sebagai *area of improvement* yaitu:

1. RUPS/Pemegang Saham belum menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen.
2. RUPS/Pemegang Saham belum memiliki sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi secara individual yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.
3. Kontrak Manajemen belum memuat target kinerja Direksi secara individu yang disahkan/disetujui Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal.
4. RUPS/Pemegang Saham belum memberikan (penilaian) Kinerja Direksi secara individu berdasarkan laporan kinerja Direksi.

3. Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, skor yang dicapai adalah **32,047** dari bobot sebesar **35,000** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **91,55%.** Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat diketahui dari beberapa praktik yang telah berjalan sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris telah memiliki dan melaksanakan program pengenalan untuk anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.
2. Dewan Komisaris telah melakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris telah memiliki mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual*.
4. Dewan Komisaris telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris telah mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya.
6. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan serta saran atas rancangan RJPP yang disampaikan Direksi.
7. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan serta saran atas rancangan RKAP yang disampaikan Direksi.
8. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.
9. Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *stakeholders* (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi.
10. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan.
11. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan.
12. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.
13. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.
14. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).
15. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.
16. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya.
17. Dewan Komisaris telah mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.
18. Dewan Komisaris telah mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.
19. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris.
20. Dewan Komisaris telah mengajukan calon Auditor Eksternal kepada Pemilik Modal.
21. Dewan Komisaris melaporkan dengan segera kepada Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
22. Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan/terlibat dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan.

23. Dewan Komisaris telah mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemilik Modal.
24. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.
25. Sekretaris Dewan Komisaris telah memiliki uraian tugas yang jelas dan telah berperan dalam membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris.
26. Sekretaris Dewan Komisaris telah melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen.
27. Sekretaris Dewan Komisaris telah menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris.
28. Dewan Komisaris telah memiliki Komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris.
29. Komite Dewan Komisaris telah memiliki piagam/*charter* dan program kerja tahunan.
30. Komite Dewan Komisaris telah melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan, serta melakukan kegiatan yang ditugaskan Dewan Komisaris.
31. Komite Dewan Komisaris telah melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris.

Namun demikian masih terdapat kondisi penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang masih memerlukan perhatian sebagai *area of improvement* yaitu:

1. Dewan Komisaris belum memiliki kebijakan tentang pelatihan bagi Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris belum menyusun laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris.
3. Pembagian tugas Dewan Komisaris belum mencakup seluruh bidang tugas Direksi
4. Rencana kerja tahunan Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat rencana pemberian persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan Direksi.
5. Rencana kerja tahunan Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat sasaran/target yang ingin dicapai dan menyampaikan rencana kerja tersebut kepada Pemilik Modal.
6. Rencana kerja tahunan Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya.
7. Rencana kerja tahunan Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaannya.
8. Rencana kerja tahunan Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan manusia dan pelaksanaannya.
9. Rencana kerja tahunan Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan dan pelaksanaannya.
10. Rencana kerja tahunan Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, serta terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat dengan pihak ketiga.

11. Rencana kerja tahunan Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat rencana membahas atau memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris, kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Anak Perusahaan/perusahaan patungan.
12. Rencana kerja tahunan Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat rencana menelaah pengusulan remunerasi Direksi.
13. Rencana kerja tahunan Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat rencana memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
14. Dewan Komisaris belum secara menyeluruh (tersistem) memberikan arahan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko.
15. Dewan Komisaris belum melakukan pembaharuan pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan setiap awal tahun.
16. Dewan Komisaris belum memiliki pedoman tata tertib rapat Dewan Komisaris yang memadai.
17. Dewan Komisaris yang berhalangan hadir dalam rapat belum seluruhnya memberikan surat kuasa serta penjelasan ketidakhadiran dalam rapat.
18. Dewan Komisaris belum melakukan penilaian Direksi secara individu berdasarkan target dan indikator kinerja utama, serta melaporkan penilaian kinerja Direksi secara kolegial ataupun individu kepada Pemegang Saham.
19. Dewan Komisaris belum melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) kinerja Dewan Komisaris, serta melaporkan hasil penilaian kepada Pemegang Saham.

4. Aspek Direksi

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Direksi, skor yang dicapai adalah **33,351** dari bobot sebesar **35,000** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **95,29%.** Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Direksi telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa praktik yang telah berjalan sebagai berikut.

1. Perusahaan melaksanakan progam pengenalan bagi Direksi yang baru diangkat dan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.
2. Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
3. Direksi melakukan penetapan standar operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (*core business*) Perusahaan.
4. Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS.
5. Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS.
6. Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan Perusahaan, penghematan/efisiensi Perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya; serta merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya secara tepat waktu dan relevan.

7. Direksi telah melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan setelah melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.
8. Direksi telah memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural).
9. Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.
10. Direksi telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat Perusahaan.
11. Direksi telah melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris.
12. Direksi telah menyusun dan menyampaikan kepada RUPS tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.
13. Direksi telah melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.
14. Direksi telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi Perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.
15. Direksi telah mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian Perusahaan.
16. Direksi telah menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (*subsidiary governance*).
17. Direksi melakukan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan secara maksimal. Hal ini ditunjukkan melalui:
    a. Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK);
    b. Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
    c. Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi dan mengamankan investasi dan aset Perusahaan;
    d. Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern (SPI) dan auditor eksternal (KAP dan BPK).
18. Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
19. Perusahaan telah melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan *stakeholders,* antara lain melalui pelaksanaan hubungan dengan pelanggan, pemasok, kreditur, Negara, karyawan Perusahaan; serta Pemilik Modal secara konsisten dan berkelanjutan.
20. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi yang ditunjukkan melalui penetapan dan penerapan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya.
21. Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemilik Modal tepat waktu.

22. Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan, melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap keputusan rapat sebelumnya.
23. Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang antara lain ditunjukkan melalui:
    a. Satuan Pengawas Intern dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya;
    b. Satuan Pengawas Intern melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan.
24. Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang ditunjukkan melalui terdapatnya faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan, dijalankannya fungsi Sekretaris Perusahaan, serta dievaluasinya fungsi Sekretaris Perusahaan tersebut.
25. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun demikian masih terdapat kondisi penerapan GCG untuk Aspek Direksi yang memerlukan perhatian sebagai *area of improvement,* yaitu:

1. Rencana kerja untuk pelatihan bagi anggota Direksi belum dapat disusun secara spesifik.
2. Perusahaan belum memiliki kebijakan tentang pedoman penyusunan sistem dan prosedur.
3. *Board Manual* belum mengatur mengenai standar waktu kesegeraan pengambilan keputusan dan pengkomunikasian keputusan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut.
4. Pencapaian target RKAP masih di bawah target.
5. Sistem pengukuran kinerja belum didukung dengan aplikasi komputer.
6. Direksi belum melaporkan tingkat pencapaian kinerja individu anggota Direksi kepada Dewan Komisaris.
7. Perusahaan belum menyusun *Information Technology Master Plan* (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi.
8. Pada tahun 2014, tidak melakukan audit atas IT.
9. Perusahaan belum sepenuhnya melakukan evaluasi efektivitas pendidikan dan pelatihan karyawan.
10. Perusahaan tidak melakukan pengukuran tingkat kepuasan karyawan di tahun 2014.
11. Laporan kepemilikan saham Direksi pada perusahaan dan perusahaan lainnya belum disusun di tahun 2014.
12. Pedoman tata tertib rapat Direksi belum sepenuhnya memuat tata penyusunan risalah rapat, pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dengan usulan Direksi.
13. *Internal Audit Charter* belum dimutakhirkan sehingga belum mengikuti metode audit berbasis risiko, serta tugas dan tanggung jawab belum meliputi penilaian terhadap internal kontrol perusahaan.

14. Belum ada anggota Satuan Pengawas Intern yang memperoleh sertifikasi profesi CIA/QIA.
15. PKPT belum dilakukan dengan pendekatan risiko (*risk based auditing*).
16. Pada tahun 2014, *Corporate Secretary* belum menyusun daftar khusus kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi. Daftar Khusus Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah (Persero) baru dibuat pada tahun 2015.

5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, skor yang dicapai adalah **6,077** dari bobot sebesar **9,000** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **67,53%.** Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi masih belum berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa praktik yang telah berjalan sebagai berikut.

1. Sarinah telah menyediakan informasi perusahaan kepada *stakeholders* terkait tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan.
2. Sarinah telah menyediakan media informasi publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
3. Sarinah telah menyediakan *website* untuk mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan yaitu www.sarinah.co.id.
4. Sarinah telah menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan berupa majalah internal, bulletin, dan sebagainya. Sarinah juga telah mengadakan pertemuan/*gathering* dengan *stakeholders*.
5. Informasi yang disediakan dalam *website* Perusahaan maupun *website* bumn.go.id telah dimutakhirkan secara berkala.
6. Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam *website* Perusahaan telah memadai.
7. Sarinah telah mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Laporan Tahunan 2014 Sarinah telah memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.
9. Laporan Tahunan 2014 Sarinah telah memuat Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi.
10. Laporan Tahunan 2014 Sarinah telah memuat profil perusahaan secara lengkap.
11. Laporan Tahunan 2014 Sarinah telah memuat pengungkapan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Namun demikian, masih terdapat kondisi penerapan GCG untuk Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi yang memerlukan perhatian sebagai *area of improvement,* yaitu:

1. Sarinah belum memiliki kebijakan khusus terkait pengendalian informasi perusahaan yang memuat:
   a. Informasi apa saja yang dikategorikan informasi publik dan informasi rahasia perusahaan;
   b. Pihak-pihak yang dapat memberikan dan/atau menyampaikan informasi publik;

c. Prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada *stakeholders*.

2. Pelaksanaan *gathering* dengan pemasok belum memasukkan agenda sosialisasi kebijakan Perusahaan.
3. Laporan Dewan Komisaris belum membahas secara spesifik mengenai Komite-Komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris.
4. Laporan Tahunan 2014 Sarinah belum memuat alamat Kantor Akuntan Publik.
5. Laporan Tahunan 2014 Sarinah belum memuat informasi terkait jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa *financial audit*.
6. Laporan Tahunan 2014 belum membahas informasi terkait ikatan yang material untuk investasi barang modal yang mencakup: (1) tujuan dari ikatan tersebut; (2) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; (3) mata uang yang menjadi denominasi; (4) langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.
7. Laporan Tahunan 2014 belum mencatumkan besarnya deviden untuk masing-masing tahun untuk 2 tahun buku terakhir dan belum dijelaskan berapa besarnya *Payout Ratio*.
8. Laporan tahunan 2014 belum mengungkapkan Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan OJK (d/k Bapepam).
9. Laporan tahunan 2014 belum mengungkapkan opini akuntan atas laporan keuangan.
10. Laporan tahunan 2014 belum mengungkapkan Deskripsi Auditor Independen di opini antara lain: (1) Nama dan tanda tangan; (2) Tanggal Laporan Audit; (3) No. ijin KAP.
11. Sarinah belum menjadi juara pada kegiatan *Annual Report Award* 2014.
12. Sarinah belum berpartisipasi dalam kegiatan *Sustainability Reporting Award*.
13. Sarinah belum berpartisipasi dalam kegiatan di bidang publikasi dan keterbukaan informasi sehingga dengan demikian belum memperoleh penghargaan di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.

6. Aspek Lainnya

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan sampai dengan Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, skor yang dicapai adalah **86,983** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **86,98%.** Oleh karena itu, penilaian Aspek Lainnya dapat dilakukan. Namun demikian, bidang/area di Perusahaan, antara lain produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, atau strategi belum menjadi *best practices* atau tujuan *benchmark* bagi perusahaan lain.

B. REKOMENDASI

Sebagai hasil *assessment* GCG, untuk temuan-temuan berkaitan dengan praktik yang masih perlu peningkatan atau perbaikan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, berikut disampaikan rekomendasi yang disusun berdasarkan lingkup wewenang masing-masing organ di Perusahaan.

1. Pemegang Saham

1. Pemegang Saham sebaiknya menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya.
2. Pemegang Saham sebaiknya menetapkan sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi secara individual yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.
3. Pemegang Saham sebaiknya memberikan penilaian Kinerja Direksi secara individu berdasarkan laporan kinerja Direksi.
4. Pemegang Saham sebaiknya mendorong Perusahaan untuk menyusun Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja Direksi secara individu untuk disahkan/disetujui Pemegang Saham/RUPS.

2. Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris agar menyusun kebijakan tentang pelatihan bagi Dewan Komisaris dan menyusun laporan mengenai hasil pelatihan yang telah diikuti.
2. Dewan Komisaris sebaiknya menetapkan pembagian tugas sesuai bidang tugas Direksi.
3. Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terkait proses persetujuan rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
4. Dewan Komisaris sebaiknya memberikan arahan terkait peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajamen risiko perusahaan secara menyeluruh atau tersistem.
5. Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksaaan sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.
6. Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap mengenai kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan tersebut.
7. Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.
8. Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya.
9. Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kepatuhan Perusahaan dalam

menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, serta terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat dengan pihak ketiga.

10. Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik membahas atau memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemegang Saham.
11. Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap terhadap pengelolaan Anak Perusahaan/perusahaan patungan.
12. Dewan Komisaris agar melakukan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan perusahaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.
13. Dewan Komisaris sebaiknya melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara individu dan menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi tersebut kepada Pemegang Saham/RUPS.
14. Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terkait pengusulan remunerasi Direksi.
15. Dewan Komisaris sebaiknya melakukan pembaharuan pernyataan benturan kepentingan setiap tahunnya melalui penandatanganan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.
16. Dewan Komisaris sebaiknya menyertakan pernyataan benturan kepentingan dalam usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS/Pemilik Modal.
17. Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terkait penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
18. Dewan Komisaris sebaiknya melakukan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris, baik melalui rapat Dewan Komisaris ataupun lainnya.
19. Dewan Komisaris sebaiknya menambahkan ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan evaluasi atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya serta pembahasan atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait usulan Direksi pada bagian rapat Dewan Komisaris dalam *Board Manual* atau pedoman lainnya.
20. Dewan Komisaris sebaiknya memberikan surat kuasa serta penjelasan secara tertulis jika Dewan Komisaris yang bersangkutan berhalangan hadir dalam rapat.

3. Direksi

1. Direksi agar memastikan bahwa pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara tepat waktu.
2. Direksi agar menyusun rencana kerja terkait pelatihan Direksi secara terinci.
3. Direksi agar memastikan penyelesaian penyusunan *database* karyawan.
4. Direksi agar mengupayakan untuk pencapaian target Perusahaan.
5. Direksi agar mengupayakan pengembangan aplikasi komputer untuk pengukuran kinerja.
6. Direksi agar mengembangkan KPI individu anggota Direksi berdasarkan KPI Korporat.
7. Direksi agar menyusun *Information Technology Master Plan* (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi.

8. Direksi agar memastikan dilakukannya audit atas IT di Perusahaan.
9. Direksi agar melakukan evaluasi efektivitas pendidikan dan pelatihan karyawan.
10. Direksi agar melakukan survei kepuasan karyawan secara berkala.
11. Direksi agar membuat surat pernyataan mengenai pengungkapan kepemilikan saham pada perusahaan lain untuk dicatat dalam daftar khusus.
12. Direksi agar melakukan pembaharuan *Board Manual*, khususnya pada bagian tata tertib rapat Direksi dengan menambahkan tata penyusunan risalah rapat, pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dengan usulan Direksi.
13. Direksi agar mengupayakan anggota Satuan Pengawas Intern memperoleh sertifikasi profesi CIA/QIA.
14. Direksi sebaiknya membuat kebijakan khusus yang lebih spesifik terkait informasi apa saja yang dikategorikan informasi publik dan informasi rahasia perusahaan; pihak-pihak yang dapat memberikan dan/atau menyampaikan informasi publik; prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada *stakeholders.*
15. Direksi agar mensosialisasikan kebijakan perusahaan yang relevan kepada pemasok.
16. Direksi sebaiknya mengupayakan untuk memenangkan kegiatan *Annual Report Award*.
17. Direksi sebaiknya mempertimbangkan untuk mengikuti kegiatan penghargaan di bidang transparansi informasi, seperti *sustainability reporting* dan lainnya.
18. Direksi sebaiknya mempertimbangkan untuk mengikuti kegiatan penghargaan di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.

4. Satuan Pengawas Intern

1. Satuan Pengawas Intern agar memutakhirkan *Internal Audit Charter.*
2. Satuan Pengawas Intern agar menyusun PKPT dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk based auditing*).

5. *Corporate Secretary*

1. *Corporate Secretary* agar senantiasa menyusun daftar khusus kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi.
2. *Corporate Secretary* sebaiknya menyajikan Laporan Tahunan yang dapat diunduh dalam *website* Perusahaan.
3. *Corporate Secretary* sebaiknya memastikan Laporan Tahunan memuat:
   a. Komite-Komite yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris dalam Laporan Dewan Komisaris;
   b. Memuat alamat Kantor Akuntan Publik;
   c. Informasi terkait jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa *financial audit*;
   d. Informasi terkait ikatan yang material untuk investasi barang modal yang mencakup (1) tujuan dari ikatan tersebut; (2) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, (3) mata uang yang menjadi denominasi, (4)

langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;

e. Informasi terkait besarnya dividen untuk masing-masing tahun untuk 2 tahun buku terakhir dan jumlah *Payout Ratio;*
f. Informasi terkait Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;
g. Opini akuntan atas Laporan Keuangan;
h. Deskripsi auditor independen di opini antara lain: (1) Nama dan tanda tangan; (2) Tanggal Laporan Audit; (3) Nomor ijin KAP.

PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI

A. PROFIL PT SARINAH (PERSERO)

Berawal dari keinginan Ir. Soekarno sebagai Presiden pertama RI yang ingin menghargai dan memuliakan nama seorang pengasuhnya yang berasal dari kalangan bawah bernama "SARINAH", maka diabadikan sebuah nama *Department Store* pertama di Indonesia pada tahun 1962, tahun dicanangkan sebagai tahun berdirinya PT Sarinah (Persero) tepatnya tanggal 17 Agustus.

Sarinah adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang ritel. Didirikan berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 17 Agustus 1962 dengan nama PT Department Store Indonesia, Sarinah merupakan pelopor bisnis ritel modern di Indonesia.

Pada awal berdirinya, Sarinah diharapkan berfungsi sebagai distributor, stimulator, stabilisator harga bahkan menjadi integrator yang mempunyai peran penghubung antara kepentingan produsen dan kepentingan konsumen dalam sistem distribusi nasional, sehingga dapat berpartisipasi dalam perubahan struktur perokonomian Indonesia. Dalam persaingan industri ritel yang semakin ketat, Sarinah dituntut untuk melakukan reposisi yang kemudian dituangkan di dalam visi dan misi perubahan yang baru yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 April 1979, nama Perusahaan diubah menjadi PT Sarinah (Persero). Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-4498.HT.01.04 tahun 1983 tanggal 15 Juni 1983.

Anggaran dasar Sarinah telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain dengan akta No. 54 tanggal 17 Maret 1983 oleh Notaris Imas Fatimah, SH mengenai peningkatan modal dasar dari 2.500 lembar Saham Prioritas dan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000,00/lembar saham diubah menjadi 100.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00/lembar saham dan mengubah modal ditetapkan dan disetor penuh dari Rp8,258 miliar menjadi Rp25 miliar. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-13703.HT.01.04 tahun 1998 tanggal 14 September 1998.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Pemegang Saham pada tanggal 8 Juli 2008, No. KEP-37/S.MBU/2008 dan KEP-04/D3-MBU/2008, akta No. 8 tanggal 11 Agustus 2008 dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA ditetapkan penambahan modal disetor menjadi Rp46,85 miliar. Penambahan tersebut berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan tahun 2007 sebesar Rp21,85 miliar. Penambahan tersebut berasal dari kapitalisasi dengan Perusahaan tahun 2007 sebesar Rp21,85 miliar.

Sepanjang 52 tahun perjalanannya, Sarinah telah mengkokohkan diri pada usaha ritel yang berbasis pada produk dalam negeri diantaranya produk usaha kecil, menengah dan koperasi. Dengan memiliki keunggulan sebagai perusahaan ritel berciri khas Indonesia,

Sarinah telah memiliki pasar tersendiri dan memposisikan dirinya sebagai toko serba ada nasional, baik di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Malang.

Berdasarkan Anggaran Dasar Nomor 8 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, bidang usaha Sarinah meliputi:

a. Menyelenggarakan usaha perdagangan barang dan jasa, meliputi perdagangan eceran (ritel), perdagangan besar (*wholesale*), keagenan, distribusi, dan ekspor impor;
b. Menyelenggarakan usaha properti dan penyewaan ruangan untuk kegiatan perdagangan;
c. Produksi atau kerja sama produksi yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang dan jasa;
d. Jasa hiburan (*entertainment*);
e. Pergudangan, pariwisata, perkantoran, apartemen, perhotelan, restoran, pendidikan di bidang ritel, prasarana dan jasa telekomunikasi, sarana olahraga dan periklanan, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

Adapun kegiatan usaha Sarinah saat ini meliputi ritel, ekspor dan impor, distribusi dan penyewaan ruangan, *money changer* dan perhotelan.

B. VISI DAN MISI

Visi
Menjadi pusat perdagangan produk Indonesia pilihan utama dunia.

Penjelasan Visi
PT Sarinah (Persero) menegaskan untuk menjadi pusat perdagangan produk Indonesia (Indonesia Emporium) sebagai jati diri Sarinah yang tetap dipertahankan. Kritis inovatif merupakan dasar untuk membangun brand Sarinah sebagai pusat perdagangan dengan nilai budaya Indonesia yang selalu lebih unggul dibandingkan dengan pesaing. Selain itu, sopan dan santun merupakan nilai dalam memberikan pelayanan khas Indonesia kepada customer. Dengan Visi PT Sarinah yang telah dijelaskan di atas, Perusahaan menegaskan agar menjadi "Pilihan Utama Dunia" yang merupakan goal ambisius yang harus dicapai Perusahaan dan mempersiapkan PT Sarinah (Persero) untuk masuk ke arena pasar global.

Misi
1. Menjadi pusat perdagangan untuk produk-produk unggulan Indonesia.
2. Mengembangkan kualitas SDM dalam merchandising serta *service excellence.*
3. Menjadi outlet tujuan utama *customer* domestik dan manca negara untuk berbelanja produk-produk unggulan Indonesia di Jakarta.
4. Meningkatkan nilai tambah produsen dan *customer* dengan penjualan produk-produk unggulan Indonesia secara *wholesale* ke luar negeri (ekspor) maupun distribusi di dalam negeri.
5. Membantu pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai mitra strategis melalui pembinaan manajemen dan pemasaran.
6. Menjadi mitra pemerintah untuk mengendalikan, melakukan impor produk-produk yang bermanfaat dan strategis.
7. Mengembangkan manajemen yang berstandar Internasional dengan berorientasi pada teknologi informasi.
8. Menerapkan *Good Corporate Governance* secara optimal pada seiap aspek bisnis.

C. BUDAYA PERUSAHAAN

PT Sarinah (Persero) mempunyai Budaya Perusahaan yang disebut dengan CITA yang terdiri dari:

- *Customer Oriented*
  Mengutamakan pelanggan dengan mengetahui dan memenuhi kebutuhan mereka.
- *Integrity*
  Mengutamakan kujujuran, kepercayaan dan keadilan dalam segala hal.
- *Teamwork*
  Membangun kerjasama yang solid untuk menghasilkan kinerja yang maksimal.
- *Attitude*
  Berperilaku sopan dan santun, amanah, *positive thinking* dan saling menghargai satu sama lain.

D. AKTIVITAS PERUSAHAAN

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, maka maksud dan tujuan dari Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang perdagangan, properti, dan jasa, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsi-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut.

a. Menyelenggarakan usaha perdagangan barang dan jasa, meliputi perdagangan eceran (ritel), perdagangan besar (*wholesale*), keagenan, distribusi, dan ekspor impor;
b. Menyelenggarakan usaha properti dan penyewaan ruangan untuk kegiatan perdagangan;
c. Produksi atau kerja sama produksi yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang dan jasa;
d. Jasa hiburan (*entertainment*);
e. Perusahaan juga dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang telah dimiliki Perusahaan, meliputi pergudangan, pariwisata, perkantoran, apartemen, perhotelan, restoran, pendidikan di bidang ritel, prasarana dan jasa telekomunikasi, sarana olahraga dan periklanan.

E. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah (Persero)tahun buku 2014 adalah sebagai berikut.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Srie Agustina
Komisaris	:	Luizah
Komisaris	:	Mualimin Abdi

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Ira Puspadewi
Direktur Operasional	:	Handriani Tjatur Setiowati
Direktur Keuangan dan Administrasi	:	Sumini

F. TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Tingkat kesehatan PT Sarinah (Persero) terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek keuangan, operasional, dan administrasi. Penilaian tingkat kesehatan PT Sarinah (Persero) tahun buku 2014 menghasilkan nilai bobot yang dikategorikan "SEHAT", klasifikasi "AA" dengan skor 81,00. Realisasi tingkat kesehatan 2014 tersebut telah mencapai target yang diharapkan. Berikut gambaran ringkas penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dari 3 (tiga) aspek yang dinilai.

Tabel Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan

INDIKATOR	2014	
	Realisasi	Anggaran
Keuangan	52,00	45,50
Operasional	14,00	14,30
Administrasi	15,00	13,00
Total Nilai/Skor	**81,00**	**72,80**
Klasifikasi Perusahaan	**AA (SEHAT)**	**AA (SEHAT)**

G. METODOLOGI *SELF ASSESSMENT* GCG

Acuan Pelaksanaan Kegiatan

Dasar pelaksanaan pekerjaan *assessment* GCG PT Sarinah (Persero) periode tahun 2014 ini adalah Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Trisakti Governance Center (TGC) Nomor: 067/DIREKSI/SPK/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.

Tujuan *Assessment* GCG

Tujuan pelaksanaan *assessment* penerapan GCG di PT Sarinah (Persero)adalah:

a. Mengukur kualitas penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) melalui penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di PT Sarinah (Persero), melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG-nya;
b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di PT Sarinah (Persero), serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG di PT Sarinah (Persero);
c. Memonitor konsistensi penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* di lingkungan PT Sarinah (Persero).

Periode *Assessment* dan Implementasi GCG

Periode penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) yang dinilai dalam pelaksanaan a*ssessment* GCG ini adalah untuk tahun buku 2014.

Parameter Penilaian

Berdasarkan standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.

Indikator/parameter tersebut dikelompokan dalam 6 (enam) Faktor/Aspek Penerapan GCG yang terdiri dari:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi;
6. Aspek Lain.

Pengumpulan dan Penilaian Data

Metode pengumpulan dan penilaian data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Melakukan pengumpulan data melalui 2 tahapan sebagai berikut.
   a. *Review* Dokumen

      Dokumen-dokumen Perusahaan yang relevan diperoleh a*ssessor* dari pihak Perusahaan melalui tim *counterpart* Perusahaan. Dalam proses ini, a*ssessor* bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen. Dokumen yang terkumpul dianalisis untuk menentukan apakah aktivitas Organ Perusahaan telah sesuai dengan parameter pengujian berdasarkan informasi dari dokumen. Simpulan hasil analisis dokumen bersifat sementara dan akan dilengkapi dengan wawancara.

   b. Wawancara dan/atau observasi

      Materi wawancara disusun berdasarkan kesimpulan sementara dari *review* dokumen. Materi wawancara adalah praktik-praktik GCG yang tidak dapat diperoleh dari metode *review* dokumen.

2. Berdasarkan data yang diperoleh, *assessor* melakukan penilaian atas pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap parameter/subindikator.

3. Menganalisis pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya pada setiap parameter/subindikator.

   Tingkat pemenuhan penerapan GCG oleh BUMN untuk setiap faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap parameter/subindikator ditetapkan sebagai berikut.

   0% : Seluruh unsur kriteria dalam parameter pengujian tidak dilaksanakan;
   25% : Sebagian kecil unsur kriteria dalam parameter pengujian dilaksanakan;
   50% : Sebagian dari unsur kriteria dalam parameter pengujian dilaksanakan;

   75% : Sebagian besar dari unsur kriteria parameter pengujian dilaksanakan;
   100% : Seluruh unsur kriteria parameter pengujian dilaksanakan.

4. Sebagai langkah akhir, *assessor* menetapkan nilai/skor hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG PT Sarinah (Persero) dengan menetapkan klasifikasi peringkat kualitas penerapan GCG, baik per indikator, aspek maupun keseluruhan, berdasarkan kriteria sebagai berikut.

Tingkat	Capaian	Peringkat
1	Nilai diatas 85	Sangat Baik
2	$75 < X \leq 80$	Baik
3	$60 < X \leq 75$	Cukup Baik
4	$50 < X \leq 60$	Kurang Baik
4	Nilai ≤ 50	Tidak Baik

Pelaporan

Tahapan akhir dari proses *assessment* adalah pelaporan hasil *assessment. Assessor* menyajikan laporan hasil *assessment,* mencakup: Ringkasan Eksekutif, Profil Perusahaan dan Metodologi, Uraian Hasil *Assessment*, termasuk lampiran hasil *assessment.* Lampiran hasil *assessment* meliputi daftar skor Hasil *Assessment* dan Daftar Rekomendasi berikut pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi.

Format laporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG terdiri dari:

a. Halaman Judul;
b. Daftar Isi;
c. Ringkasan Eksekutif;
d. Profil Perusahaan dan Metodologi;
e. Uraian Hasil *Assessment*;
f. Lampiran.

KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG PT SARINAH (PERSERO)

ASPEK I:
KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG *Code*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).				1,218	100,00%	1,218
	1	Perusahaan memiliki Pedoman Telola Perusahaan yang Baik (GCG *Code*) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	**Kekuatan** • Sarinah telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG Code) tahun 2014 yang mencakup Profil Perusahaan (latar belakang, visi dan misi, budaya perusahaan) PT Sarinah (Persero) dan pedoman bagi organ perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi) dan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,609	100,00%	0,609

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			pedoman bagi Komite Penunjang Dewan Komisaris dan pemangku kepentingan yang disahkan tanggal 08 Desember 2014. • Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) Sarinah telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) di Jakarta pada tanggal 08 Desember 2014. • Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) telah mengacu kepada Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Badan Usaha Milik Negara, seperti Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Badan Usaha Milik Negara, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012. • Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) Sarinah telah ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala setiap 1 tahun sekali dan sewaktu-waktu dapat direvisi berdasarkan urgensi. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya pedoman GCG tahun sebelumnya yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Sarinah (Persero) di Jakarta Januari 2013. **<u>Kelemahan</u>** -				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	2	Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	**Kekuatan** • Sarinah telah memiliki Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) tahun 2014 yang telah mencakup Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris, Pernyataan Nilai-Nilai Perusahaan, Perilaku Etika, dan Penegakan Pedoman Perilaku (Sosialisasi dan Internalisasi; Pengujian dan Pengukuran Pemahaman Pedoman Perilaku; Pelaporan Pelanggaran Terhadap Pedoman Perilaku; Sanksi atas Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku; dan Pernyataan Kepatuhan). • Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) di Jakarta pada tanggal 08 Desember 2014. • Isi dari Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) telah memuat hal-hal	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,609	100,00%	0,609

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			sebagai berikut. 1. Pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris; 2. Nilai-nilai perusahaan (*values*); 3. Benturan kepentingan; 4. Pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan dan pemberian donasi; 5. Kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian; 6. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi; 7. Integritas laporan keuangan; 8. Perlindungan informasi perusahaan dan *intangible asset*; 9. Perlindungan kerahasiaan informasiorang dalam Sarinah yaitu seluruh insan PT Sarinah (Persero) (untuk				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			BUMN Tbk); 10. Perlindungan harta perusahaan; 11. Kegiatan sosial dan politik; 12. Etika yang terkait dengan *stakeholders*. 13. Mekanisme penegakan Pedoman Perilaku termasuk pelaporan atas pelanggaran; 14. Pelanggaran dan sanksi. • Pedoman perilaku (*Code of Conduct*) Sarinah ditinjau setiap 1 tahun sekali dan sewaktu-waktu bisa direvisi berdasarkan urgensi. Hal ini ditunjukkan dari terdapatnya pedoman perilaku tahun sebelumnya yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Sarinah (Persero) di Jakarta pada Januari 2013. **<u>Kelemahan</u>** -				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
2	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.				1,217	100,00%	1,217
	3	Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggungjawab dalam penerapan dan pemantauan tata kelola perusahaan yang baik.	**<u>Kekuatan</u>** • Berdasarkan *Board Manual* tahun 2010, Direktur Administrasi Keuangan ditunjuk sebagai Direktur yang bertanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. • Terdapat uraian tugas anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang mencakup: 1. Direksi telah menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata	**<u>Hambatan</u>** - **<u>Rekomendasi</u>** -	0,456	100,00%	0,456

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 2. Direksi telah memantau dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku; 3. Direksi telah memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga. • Terdapat laporan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang disampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal dan Dewan				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Komisaris minimal sekali dalam setahun yang berupa Laporan *Self Assessment* Penerapan GCG PT Sarinah (Persero) Tahun 2014 untuk periode tahun 2013 yang di tandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama pada tanggal 30 September 2014. **Kelemahan** -				
	4	Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku.	**Kekuatan** • Terdapat kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai praktik yang terdapat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) berupa Pedoman Perilaku Etika, Piagam Internal Audit, Piagam Komite Audit dan berbagai kebijakan yang terdapat dalam Keputusan Direksi.	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,761	100,00%	0,761

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Berbagai kebijakan dan panduan tambahan tersebut telah terdokumentasikan dengan baik. Kebijakan dan panduan tambahan tersebut telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi melalui Kegiatan Sosialisasi pedoman GCG dan Pedoman Perilaku. • Sarinah memiliki berbagai kebijakan dan panduan tambahan terkait Pedoman Perilaku Etika yang terdapat dalam Surat Keputusan Direksi antara lain Pedoman dan Prosedur Gratifikasi serta Pedoman dan Prosedur *Whistleblowing System* (WBS). Kebijakan dan panduan tersebut telah dikomunikasikan dan				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			disosialisasikan kepada organ pendukung Dewan Komisaris dan karyawan perusahaan melalui Kegiatan Sosialisasi pedoman GCG dan Pedoman Perilaku. • Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris telah menandatangani komitmen untuk mematuhi Pedoman Perilaku di Jakarta pada tanggal 08 Desember 2014. • Seluruh karyawan Sarinah juga telah menandatangani secara berkala pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku pada tanggal 10 Februari 2015 pukul 10.00-12.00 WIB di Ruang Pelatihan Lantai 13. • Tingkat pemahaman yang baik terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku oleh Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			karyawan perusahaan. • Berdasarkan konfirmasi dengan karyawan telah dilakukan proses *induction* (pengenalan) bagi karyawan baru tentang materi Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya. **Kelemahan** -				
3	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.				0,608	100,00%	0,608
	5	Perusahaan melakukan *assessment* terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan *review* secara berkala.	**Kekuatan** • Sarinah telah melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam bentuk: 1. Pada tahun 2014, telah dilaksanakan *Self Assessment* penerapan GCG PT Sarinah	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,304	100,00%	0,304

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			(Persero) untuk periode tahun 2013 dengan melibatkan pihak ketiga untuk memastikan objektivitasnya dan telah mengungkapkan hasil *self assessment* tersebut dalam laporan tahunan 2014. Hasil *Self Assessment* penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) periode tahun 2013 mencapai total skor sebesar 82,03%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) periode tahun 2013 telah mencapai kualifikasi "BAIK". 2. Telah terdapat Evaluasi (*review*) yang mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan. • Telah terdapat laporan hasil *assessment*/penilaian GCG dan				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			evaluasi yang dilaporkan dalam Laporan Tahunan. **Kelemahan** -				
	6	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur *Key Performance Indicator* (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen.	**Kekuatan** • Terdapat KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen; KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik berupa kualitas penerapan GCG (Skor Penilaian GCG), pelaksanaan unsur-unsur GCG antara lain penerapan manajemen risiko, pengendalian intern, pengawasan intern (audit internal), pelaksanaan mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi, dan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,304	100,00%	0,304

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*). • Tingkat pencapaian KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan telah teepenuhi sebesar 99,16%. Skor yang ditargetkan sebesar 83,00 sedangkan skor yang dicapai sebesar 82,03. **Kelemahan** -				
4	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).				1,370	77,78%	1,066
	7	Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pejabat satu tingkat di	**Kekuatan** • Sarinah telah memiliki kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan penyampaian LHKPN yang terdapat dalam	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,609	100,00%	0,609

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		bawah Direksi.	Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) No.002/KPTS/Direksi/I/2015 Tanggal 20 Januari 2015 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Sarinah (Persero). • Keputusan Direksi tentang Jabatan dalam organisasi BUMN yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK diatur dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) No. 002/KPTS/Direksi/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Sarinah (Persero) poin 2 yang menyebutkan Penyelenggara Negara di PT Sarinah (Persero)				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			adalah: Direksi dan Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero), serta Pejabat *Work Level* 1/ Setingkat. • Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) No. 002/KPTS/Direksi/I/2015 Tanggal 20 Januari 2015 juga telah mengatur mengenai pejabat perusahaan yang ditugaskan melaksanakan koordinasi dengan KPK terkait dengan pengelolaan LHKPN, yakni dikoordinasikan oleh Divisi General Manager Divisi Legal dan Manajemen Risiko. • Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) No. 002/KPTS/Direksi/I/2015 Tanggal 20 Januari 2015 telah mengatur kebijakan/peraturan mengenai pemberian sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang belum memyampaikan LHKPN				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Kelemahan** -				
	8	Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.	**Kekuatan** • Telah terdapat surat edaran terkait dengan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN kepada pegawai terkait. **Kelemahan** • Masih terdapat keterlambatan dalam melaporkan LHKPN. Sampai dengan Maret 2015 sebanyak 86,36% dari jumlah yang wajib lapor belum melaporkan LHKPN.	**Hambatan** • Masih kurangnya kesadaran dalam melaporkan LHKPN. **Rekomendasi** • Direksi agar memastikan bahwa pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara tepat waktu.	0,304	62,50%	0,190
	9	Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.	**Kekuatan** • Sarinah telah melakukan pelaporan berkala terkait perkembangan pemenuhan	**Hambatan** • Masih kurangnya kesadaran dalam melaporkan LHKPN.	0,457	58,33%	0,267

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK. • Terdapat pemberian teguran bagi Penyelenggara Negara yang belum/tidak memyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan. **Kelemahan** • Tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan LHKPN masih **belum** sesuai harapan. Berdasarkan Ringkasan Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara PT Sarinah sampai dengan Maret 2015 sebanyak 86,36% dari jumlah yang wajib lapor belum melaporkan LHKPN.	**Rekomendasi** • Direksi agar memastikan bahwa pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara tepat waktu.			
5	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.				1,370	100,00%	1,370

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	10	Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.	**Kekuatan** • Sarinah telah memiliki kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi berupa Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 026/KPTS/DIREKSI/VIII/2013 tentang Penambahan atas Pedoman Perilaku Etika PT Sarinah (Persero) dengan Ketentuan/Kebijakan atas Pemberian dan Penerimaan Hadiah Serta Donasi (Gratifikasi). • Kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi meliputi komitmen Dewan Komisaris dan Direksi, ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi, fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi, pemantauan atas pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan ketentuan gratifikasi.	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,304	100,00%	0,304

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan -				
	11	Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan pengendalian gratifikasi.	**Kekuatan** • Terdapat pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan perusahaan melalui internal memo. • Sarinah telah melakukan kegiatan pendistribusian ketentuan dan perangkat Pengendalian Gratifikasi di lingkungan perusahaan. • Tingkat pemahaman Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan terhadap pengendalian gratifikasi sudah cukup baik. • Sarinah telah melakukan kegiatan diseminasi mengenai Pengendalian Gratifikasi kepada *stakeholders* melalui *website* perusahaan yang ditunjukkan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,609	100,00%	0,609

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			melalui terdapatnya ketentuan terkait yang di *upload* di *website* Sarinah. **Kelemahan** -				
	12	Perusahaan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.	**Kekuatan** • Berdasarakan Laporan Tahunan 2014, Sarinah telah melaksanakan kegiatan pengelolaan gratifikasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. • Berdasarkan Laporan Tahunan 2014 dan Laporan manajemen, terdapat pelaporan tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan. • Sarinah telah melakukan peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,457	100,00%	0,457

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			pendukung. **Kelemahan** -				
6	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (*whistleblowing system).*				1,217	100,00%	1,217
	13	Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan *(whistleblowing system).*	**Kekuatan** • Sarinah telah memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang tercantum dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 039/KPTS/DIREKSI/IX/2014 tentang Pembentukan Komisi Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) PT Sarinah (Persero) yang memuat pedoman *whistleblowing system.* • Materi pedoman penerapan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,304	100,00%	0,304

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system)* mencakup: a) Perlindungan pelapor dimuat pada Bagian C tentang Perlindungan Tentang Pelapor yang mencakup: 1. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan; 2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun; 3. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku terhadap para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak- pihak yang				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan tersebut. b) Unit pengelola sistem pelaporan pelanggaran terdapat pada bagian Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran yang menjelaskan bahwa pelapor menyampaikan pengaduan pelanggaran kepada Komisi Pelaporan Pelanggaran. c) Kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran terdapat pada bagian Prinsip Dasar. d) Mekanisme penyampaian pelanggaran (infrastruktur dan mekanisme, kerahasiaan dan perlindungan pelapor, komunikasi dengan pelapor) yang terdapat pada bagian Pengelolaan Sistem Pelaporan				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Pelanggaran yang menjelaskan bahwa pelapor menyampaikan pengaduan pelanggaran kepada Pengelola Komisi Pelaporan Pelanggaran melalui sarana atau media telepon, email perusahaan yang khusus diperuntukkan bagi Sistem Pengelolaan Pelanggaran. e) Pelaksanaan investigasi yang terdapat pada Sistem Pelaporan Pelanggaran Sub Bagian B tentang Prosedur Pengeloaan yang menyatakan bahwa alur proses investigasi telah secara lengkap dan sistematis diuraikan pada Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) PT Sarinah (Persero) yang dilampirkan pada keputusan Direksi tersebut.				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			f) Pelaporan atas penyelenggaraan sistem pelaporan pelanggaran terdapat pada Bagian E tentang Laporan Komisi Pelaporan Pelanggaran yang menyatakan bahwa Komisi Pelaporan Pelanggaran wajib membuat laporan secara berkala, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang disampaikan selambat-lambatnya minggu kedua pada bulan berikutnya yang meliputi jumlah pengaduan/penyingkapan, kategori pengaduan serta media yang digunakan oleh pelapor dan penyampaiannya kepada Direksi. **<u>Kelemahan</u>** -				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	14	Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan *(whistle blowing system*)	**Kekuatan** • Terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan *whistleblowing system* kepada karyawan perusahaan yang disampaikan melalui berbagai media, seperti buletin internal, poster, sosialisasi etika, maupun presentasi langsung kepada unit kerja terkait. • Terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan *whistleblowing system* kepada *stakeholders* perusahaan melalui *website* Sarinah. **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,304	100,00%	0,304
	15	Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (*whistleblowing system*).	**Kekuatan** • Terdapat sarana/media perusahaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan *whistleblowing system* antara lain telepon, email dan faksimili yang khusus	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,609	100,00%	0,609

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			diperuntukkan bagi Sistem Pengelolaan Pelanggaran. • Berdasarkan Laporan Tahunan 2014, belum ada laporan atau pengaduan yang masuk melalui *whistleblowing system* PT Sarinah (Persero). **Kelemahan** -				
	JUMLAH ASPEK I				**7,000**	**95,65%**	**6,696**

KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG

PT SARINAH (PERSERO)

ASPEK II:
PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
7	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi .				2,423	97,14%	2,354
	16	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	**Kekuatan** • Pemegang Saham telah menetapkan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi yang terdapat dalam Anggaran Dasar pasal 10. Selain itu, Kementerian BUMN yang mewakili Negara Republik Indonesia selaku pemegang 100% saham Perusahaan telah menetapkan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-16/MBU/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. • Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi telah memuat uraian mengenai Mekanisme penjaringan atau nominasi calon anggota Direksi; dan Penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) bagi anggota Direksi. **Kelemahan** -				
	17	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi.	**Kekuatan** • Pada tahun 2014 terdapat pengangkatan Direksi baru Perusahaan. Berdasarkan konfirmasi dengan Pemegang Saham, telah terdapat Daftar Bakal Calon yang disetujui oleh Menteri BUMN yang berisikan nama-nama yang diperoleh	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,692	100,00%	0,692

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			melalui proses penjaringan dalam rangka memperoleh calon anggota Direksi. • Berdasarkan konfirmasi, seluruh Bakal Calon yang disetujui oleh Menteri Negara BUMN diundang secara tertulis oleh Tim dan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK) sesuai ketentuan yang berlaku. • Berdasarkan konfirmasi, telah terdapat penetapan hasil akhir UKK dan Evaluasi oleh Tim dan disampaikan kepada Menteri Negara BUMN. • Berdasarkan konfirmasi, anggota Direksi terpilih adalah yang tercantum dalam penetapan hasil UKK dan Evaluasi yang disampaikan oleh Tim. **<u>Kelemahan</u>** -				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	18	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi.	**Kekuatan** • Berdasarkan kajian dokumen diketahui bahwa pengangkatan Direksi telah dilakukan dengan menggunakan Keputusan RUPS atau menggunakan Keputusan Menteri. Telah terdapat penetapan pengangkatan Ibu Ira Puspadewi sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-152/MBU/2014. • Pembidangan tugas Direksi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Penunjukan Direksi. • Komposisi Direksi telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, Direksi memiliki latar belakang pendidikan/pengetahuan dan/atau pengalaman yang sesuai dengan jenis usaha Sarinah dan seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman yang sesuai dengan pembidangan tugas anggota Direksi. **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,520	100,00%	0,520

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	19	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi.	**Kekuatan** • Pemegang Saham telah menetapkan ketentuan mengenai jenis-jenis jabatan rangkap anggota Direksi yang menimbulkan benturan kepentingan yang termuat di dalam: 1. Permen BUMN No: PER-16/MBU/2012; 2. Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 10 ayat 34. • Ketentuan perangkapan jabatan telah memuat jenis-jenis perangkapan jabatan dan pengaturan/mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap tersebut atau jabatan anggota Direksi seperti yang tercantum di dalam Permen BUMN No:PER-16/MBU/2012. **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,346	100,00%	0,346
	20	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik	**Kekuatan** • Penetapan pemberhentian anggota Direksi Perusahaan setelah selesai	**Hambatan** -	0,173	100,00%	0,173

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	masa tugasnya telah dilakukan dengan keputusan Menteri selaku RUPS, seperti yang tercantum di dalam Surat Kementerian Negara BUMN Nomor: S-138/D2.MBU/2014 tanggal 26 Mei 2014. • Selama tahun 2014 tidak terdapat pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu. **Kelemahan** -	**Rekomendasi** -			
	21	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	**Kekuatan** • Selama tahun 2014 tidak terdapat pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris. **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,346	100,00%	0.346

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
8	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.				1,731	96,66%	1,673
	22	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	**Kekuatan** • Telah terdapat pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris, yang tercantum di dalam: 1. AD PT Sarinah (Persero) pasal 14; 2. UU Nomor 19 tahun 2003; 3. PP Nomor 45 tahun 2005; 4. PER-19/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. • Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, telah mengatur mengenai: (a) penjaringan atau nominasi calon anggota Dewan Komisaris; (b) penilaian bagi calon anggota Dewan Komisaris.	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan -				
	23	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	**Kekuatan** • Berdasarkan kuesioner dan konfirmasi pada Pemegang Saham telah melakukan pemilihan calon anggota Dewan Komisaris. • Berdasarkan kuesioner dan konfirmasi pada Pemegang Saham telah melaksanakan penilaian terhadap Calon Dewan Komisaris. • Berdasarkan kuesioner dan konfirmasi pada Pemegang Saham menyatakan bahwa penilaian Calon Dewan Komisaris telah mencakup semua kriteria penilaian Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN. • Berdasarkan kuesioner dan konfirmasi pada Pemegang Saham menyatakan bahwa penetapan Dewan Komisaris terpilih telah berdasarkan hasil akhir penilaian.	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,519	100,00%	0,519

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan -				
	24	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komposisinya.	**Kekuatan** • Pengangkatan Dewan Komisaris: Penetapan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS/Pemilik Modal telah memenuhi ketentuan yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir. Pengangkatan Dewan Komisaris telah dilakukan melalui Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS/Pemilik Modal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-91/MBU/2014 tanggal 29 April 2014 • Komposisi Dewan Komisaris: saat ini jumlah Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota Direksi. Di dalam komposisi Dewan Komisaris tidak terdapat mantan anggota Direksi.	**Hambatan** - **Rekomendasi** • Pemegang Saham agar menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya.	0,347	83,33%	0,289

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan • RUPS/Pemegang Saham **belum** menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris.				
	25	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	**Kekuatan** • Pemegang Saham/RUPS telah mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Yang termuat di dalam: 1. UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN; 2. PP No. 45 tahun 2005; 3. AD Perusahaan Pasal 14 ayat 32. • Telah terdapat keputusan RUPS/Pemilik Modal menetapkan jabatan-jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	26	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	**Kekuatan** • Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris karena selesainya masa jabatan telah dilakukan melalui keputusan Menteri, sebagai berikut: Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-207/MBU/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang berisi: Memberhentikan Sdr. Sharmila sebagai Komisaris dikarenakan telah habis masa jabatannya. • Berdasarkan kuesioner dan konfirmasi pada Pemegang Saham menyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dan/atau keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya, dengan melalui tahapan sesuai ketentuan yang diatur. **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,173	100,00%	0,173

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
9	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.				1,385	100,00%	1,385
	27	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka Penjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.	**Kekuatan** • Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan pedoman penyusunan RJPP yang tercantum di dalam: 1. Kepmen BUMN Nomor: KEP-102/MBU/2002 tentang penyusunan RJPP BUMN; 2. Anggaran Dasar Perusahaan. • Pemegang Saham/RUPS telah melakukan pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP. Didahului oleh pemaparan Direksi atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS serta penyampaian paparan/tanggapan oleh Dewan Komisaris. Hal tersebut sesuai dengan: 1. Keputusan Menteri Negara BUMN	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,519	100,00%	0,519

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Nomor: S-668/MBU/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014, Perihal: Pengesahan Rencana Jangka Panjang PT Sarinah (Persero) Tahun 2014-2018. 2. Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor: 040/DEKOM/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014; Surat ditujukan kepada Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan Kementerian BUMN. • Pemegang Saham/RUPS telah memberikan pengesahan/ persetujuan terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP. • Pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau Revisi RJPP telah dilaksanakan tepat waktu. Pengesahan RJPP (16 Oktober) oleh Pemegang Saham berselang 2 hari setelah Direksi menyampaikan RJPP kepada Pemegang Saham (14 Oktober). **<u>Kelemahan</u>** -				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	28	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).	**Kekuatan** • Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan pedoman penyusunan RKAP yang tercantum di dalam: 1. Kepmen BUMN Nomor: KEP-101/MBU/2002 tentang penyusunan RKAP BUMN; 2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU.2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN padal 21; 3. Anggaran Dasar Perusahaan pasal 17. • Pemegang Saham telah melakukan pembahasan/pengkajian/penelaahan terhadap rancangan RKAP, didahului dengan pemaparan oleh Direksi sesuai dengan Risalah RUPS pengesahan RKAP Tahun 2014, Nomor: 010.1/DIREKSI/E/I/2014 tanggal 7 Januari 2014. Serta penyampaian tanggapan oleh Dewan Komisaris melalui Surat Dewan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,520	100,00%	0,520

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Komisaris Nomor: 51/DEKOM/XII/2013 tentang Pendapatan dan Saran Dewan Komisaris atas RKAP PT Sarinah (Persero) tahun 2014 tanggal 19 Desember 2013. • Pemegang Saham telah memberikan pengesahan/persetujuan terhadap rancangan RKAP, berdasarkan Risalah RUPS Nomor: 010.1/DIREKSI/E/I/2014, tanggal 7 Januari 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014. • Pengesahan/persetujuan rancangan RKAP disahkan pada 7 Januari 2014, oleh RUPS. Hal ini masih ditolerir sebagai pengesahan yang tepat waktu. **Kelemahan** -				
	29	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan	**Kekuatan** • Pemegang Saham telah melakukan pembahasan/pengkajian/penelaahan terhadap usulan Direksi yang perlu	**Hambatan** -	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal.	mendapat persetujuan/keputusan RUPS. Sebagai contoh, Pemegang Saham menyetujui pengagunan aset tetap Perusahaan untuk penarikan kredit perbankan berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-527/MBU/09/2014 tanggal 12 September 2014. • Pemegang Saham telah memberikan persetujuan/keputusan terhadap usulan Direksi, seperti contoh di atas. • Persetujuan/keputusan oleh Pemegang Saham/RUPS telah dilaksanakan tepat waktu, sesuai dengan Surat persetujuan Dewan Komisaris atas pelepasan aset perusahaan Nomor: 49/DEKOM/XI/2014. **Kelemahan** -	**Rekomendasi** -			
10	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas				2,077	93,75%	1,947

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.						
	30	RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	**<u>Kekuatan</u>** **Penilaian Kinerja Direksi** • Telah terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial) yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. Sebagaimana tercantum di dalam 1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-04/MBU/2013 tanggal 18 April 2013. • Telah terdapat Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja Direksi secara kolegial yang disahkan/disetujui Pemegang Saham/RUPS. Kontrak Manajemen tersebut telah ditandatangani pada 7 Januari 2014 (tercantum di dalam RKAP 2014).	**<u>Hambatan</u>** - **<u>Rekomendasi</u>** • Pemegang Saham agar menetapkan sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi secara individual yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. • Pemegang Saham agar mendorong Perusahaan untuk menyusun Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja Direksi secara individu untuk	0,346	62,50%	0,216

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			• RUPS/Pemilik Modal telah memberikan (penilaian) Kinerja Direksi secara kolegial berdasarkan laporan kinerja Direksi dan mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris yang dituangkan melalui Risalah RUPS Nomor: RIS-54/D2.MBU/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014. **Penilaian Kinerja Dewan Komisaris** • Telah terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris (majelis) yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. Sebagaimana tercantum di dalam 1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-04/MBU/2013 tanggal 18 April 2013 • Telah terdapat Kontrak Manajemen yang memuat target Dewan Komisaris secara kolegial yang disahkan/disetujui	disahkan/disetujui Pemegang Saham/RUPS. • RUPS agar memberikan (penilaian) Kinerja Direksi secara individu berdasarkan laporan kinerja Direksi.			

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Pemegang Saham/RUPS. Kontrak Manajemen tersebut telah ditandatangani pada 7 Januari 2014 (Tercantum di dalam RKAP 2014). • RUPS/Pemilik Modal telah memberikan (penilaian) Kinerja Dewan Komisaris secara kolegial berdasarkan laporan kinerja Direksi dan mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris yang dituangkan melalui Risalah RUPS Nomor: RIS-54/D2.MBU/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014. **Kelemahan** • **Belum** terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi secara individual yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. • Kontrak Manajemen **belum** memuat target kinerja Direksi secara individu yang disahkan/disetujui Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal.				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			• RUPS **belum** memberikan (penilaian) Kinerja Direksi secara individu berdasarkan laporan kinerja Direksi.				
	31	RUPS menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	**Kekuatan** • Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014, tentang Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris telah memuat tentang : (1) formula pehitungan gaji/honorarium; (2) Formula perhitungan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas tersebut memperhatikan pendapatan, aktiva, tingkat inflasi, serta mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (*benchmark*), kondisi persaingan usaha (*competitiveness*) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia. • Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			pedoman yang ditetapkan yaitu Risalah RUPS Nomor: RIS-54/D2.MBU/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014. • Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014, tentang Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Pedoman tantiem/insentif kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, diantaranya memuat tentang: (1) formula pehitungan tantiem/insentif kinerja; (2) Formula perhitungan tantiem/insentif kinerja mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan, dan faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*). • Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan tantiem/insentif kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan sesuai dengan Risalah RUPS Nomor: RIS-54/D2.MBU/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Laporan Keuangan Tahun Buku 2014. **Kelemahan** -				
	32	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan perusahaan.	**Kekuatan** • Berdasarkan konfirmasi, Pemegang Saham menyatakan telah menetapkan pedoman penunjukan audit eksternal. • Berdasarkan konfirmasi, Pemegang Saham telah melakukan pembahasan/pengkajian/penelaahan terhadap calon-calon auditor eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris • Pemegang Saham/RUPS telah memutuskan penunjukan Auditor Eksternal yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan, di dalam Risalah RUPS PT Sarinah (Persero) Nomor: 332.1/DIREKSI/E/III/2014 tanggal 26 Maret 2014, tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2013, yang salah satunya meminta kepada Dewan Komisaris untuk melakukan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			pemilihan KAP sesuai dengan proses pengadaan yang berlaku. **Kelemahan** -				
	33	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	**Kekuatan** • Telah terdapat pedoman penyusunan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Pemegang Saham/RUPS, yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 18. • Berdasarkan Risalah RUPS Nomor: RIS-54/D2.MBU/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014: 1. Telah terdapat telaahan terhadap laporan tahunan (termasuk laporan keuangan) dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh Pemegang Saham. 2. Pemegang Sahan/RUPS telah memberikan persetujuan laporan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,520	100,00%	0,520

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris. Persetujuan tersebut dituangkan dalam bentuk risalah RUPS. 3. Pemegang Saham/RUPS telah memberikan pembebasan tanggung jawab terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. **Kelemahan** -				
	34	Pemegang Saham/RUPS/ Pemilik Modal menetapkan penggunaan laba bersih.	**Kekuatan** • Perusahaan telah memiliki pedoman/kebijakan dividen yang dilakukan dalam mekanisme RUPS dan di dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 26. • Penetapan penggunaan laba bersih untuk dividen telah mempertimbangkan pengembangan usaha/investasi perusahaan. Untuk Tahun Buku 2014, RUPS menyetujui	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			penggunaan laba bersih perusahaan sebesar Rp15.223.680.281 seluruhnya sebagai cadangan, hal tersebut tercantum di dalam Risalah RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014. Nomor: RIS-54/D2.MBU/05/2015 tanggal 29 Mei 2015. • Berdasarkan konfirmasi pada Pemegang Saham, penetapan penggunaan laba bersih untuk dividen tidak melanggar ketentuan perjanjian pinjaman atau ketentuan penerbitan obligasi. **Kelemahan** -				
	35	Pengesahan terhadap laporan tahunan dan persetujuan terhadap laporan keuangan dilaksanakan tepat waktu.	**Kekuatan** • Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan telah dilaksanakan tepat waktu, hal ini berdasakan kajian dokumen berupa Risalah RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,173	100,00%	0,173

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014. Nomor: RIS-54/D2.MBU/05/2015 tanggal 29 Mei 2015. **Kelemahan** -				
11	RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.				0,519	100,00%	0,519
	36	RUPS mengambil keputusan sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.	**Kekuatan** • Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, Ketua RUPS adalah salah seorang Pemegang saham. Dalam beberapa RUPS yang telah dilakukan Perusahaan, praktik ini telah dapat dipenuhi. • Pemegang Saham PT Sarinah (Persero) adalah Negara Republik Indonesia dan telah menjalankan perannya dalam RUPS.	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,173	100,00%	0,173

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan -				
	37	RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.	**Kekuatan** • Pemegang Saham PT Sarinah (Persero) 100% adalah Negara Republik Indonesia. • Pengambilan keputusan RUPS telah dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. • RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS. Keputusan atas mata acara tambahan tersebut harus disetujui dengan suara bulat. **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,346	100,00%	0,346
12	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai				0,865	100,00%	0,865

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	dengan wewenang dan tanggung jawabnya.						
	38	Pemegang Saham/Pemilik Modal memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	**Kekuatan** • Pemegang Saham dalam RUPS memberikan arahan atau persetujuan terkait dengan persetujuan transaksional, tercantum di dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-152/MBU/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang persetujuan pengagunan aset tetap perusahaan untuk penarikan kredit perbankan. • Terdapat pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan tercantum di dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: S-713/MBU/D2/11/2014 tanggal 5 November 2014 tentang hasil *self assessment* penerapan GCG PT Sarinah (Persero) tahun 2014. • Pemegang Saham melakukan upaya-upaya menindaklanjuti *area of improvement* yang dihasilkan dari *assessment* atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			perusahaan yang bersangkutan, seperti yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: S-713/MBU/D2/11/2014 tanggal 5 November 2014 tentang hasil *self assessment* penerapan GCG PT Sarinah (Persero) tahun 2014. **Kelemahan** -				
	39	Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.	**Kekuatan** Berdasarkan kuesioner dan konfirmasi pada Pemegang Saham. Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan. Arahan-arahan yang diberikan Pemegang Saham dalam RUPS merupakan arahan yang bersifat strategis. **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,173	100,00%	0,173

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	40	Pemegang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan	**Kekuatan** • Berdasarkan kuesioner, RUPS menetapkan sistem penerimaan pelaporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Sistem penerimaan pelaporan dapat disampaikan langsung dari Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. • Selama 2014, tidak terjadi penurunan kinerja. **Kelemahan** -		0,346	100,00%	0,346
JUMLAH ASPEK II					**9,000**	**97,92%**	**8,812**

KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG

PT SARINAH (PERSERO)

ASPEK III:
DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
13	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.				1,348	75,00%	1,011
	41	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	**<u>Kekuatan</u>** • Berdasarkan kuesioner, Dewan Komisaris telah menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan progran pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, sesuai dengan kebijakan yang tercantum di dalam *Board Manual* di bab IV poin 4.1.4 halaman 43.	**<u>Hambatan</u>** - **<u>Rekomendasi</u>** -	0,674	100,00%	0,674

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			• Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat telah mengikuti program pengenalan perusahaan yang dilaksanakan pada 26 Mei 2014 untuk pengenalan Dewan Komisaris Baru dan Direksi Baru yang dilaksanakan pada 28 Agustus 2014. Dokumen berupa *slide* paparan umum PT Sarinah (Persero) dan daftar hadir. • Kegiatan Pengenalan Dewan Komisaris Baru dihadiri oleh 1 anggota Dewan Komisaris yaitu Bpk Mualimin Abdi (peserta lainnya seluruh anggota Direksi dan *Vice President Corporate Secretary*), sedangkan kegiatan pengenalan Direksi baru dihadiri oleh Direksi (Direktur Utama, Direktur Operasi dan Direktur Keuangan) dan *Vice President Corporate Secretary*. **<u>Kelemahan</u>** -				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	42	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai kebutuhan.	**Kekuatan** • Rencana kerja dan anggaran (RKA) untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris telah dimuat dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2014 yang memuat besaran anggaran/biaya untuk seminar/program pemasaran sebesar Rp100 juta. • Berdasarkan kuesioner, Dewan Komisaris menyatakan bahwa pelaksanaan pelatihan telah dilaksanakan sesuai dengan RKA. **Kelemahan** • Dewan Komisaris **belum** memiliki kebijakan tentang pelatihan bagi Dewan Komisaris. • **Belum** terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris.	**Hambatan** - **Rekomendasi** • Dewan Komisaris agar menyusun kebijakan tentang pelatihan bagi Dewan Komisaris. • Dewan Komisaris agar menyusun laporan mengenai hasil pelatihan yang telah diikuti.	0,674	50,00%	0,337

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
14		Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.			2,127	98,10%	2,087
	43	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	**Kekuatan** • Telah terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris, seperti yang rercantum di dalam Anggaran Dasar PT Sarinah (Persero) pasal 14 ayat 24. • Pembagian tugas diantara Dewan Komisaris ditetapkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 13 Desember 2013.	**Hambatan** • Bidang pengawasan Dewan Komisaris masih fokus pada bidang operasional dan investasi. **Rekomendasi** • Dewan Komisaris sebaiknya menetapkan pembagian tugas sesuai bidang tugas Direksi	0,648	93,75%	0,608

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			• Berdasarkan keputusan tersebut, pembagian tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 1. Ibu Srie Agustina (Komisaris Utama) bertugas melakukan pengawasan secara umum atas kepengurusan perusahaan oleh Direksi dan Manajemen Risiko; 2. Bpk Mualimin Abdi (Anggota Komisaris) bertugas melakukan pengawasan atas kepengurusan perusahaan oleh Direksi dan Manajemen terkait produksi dan operasional; 3. Ibu Luizah (Anggota Komisaris) bertugas melakukan pengawasan atas kepengurusan oleh Direksi dan Manajemen terkait keuangan dan investasi. • Terdapat penugasan anggota Dewan Komisaris sebagai ketua/wakil/anggota Komite Dewan Komisaris, sesuai dengan Surat				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Keputusan Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Nomor: 02/DEKOM/Kep/X/2014, tanggal 22 Oktober 2014 dan SK Nomor 03/DEKOM/Kep/X/2014. Berdasarkan SK tersebut, Dewan Komisaris telah mengangkat Ibu Luizah sebagai ketua Komite Audit dan Bpk Mualimin Abdi sebagai ketua Komite Investasi dan Risiko Usaha. **Kelemahan** • Pembagian tugas Dewan Komisaris **belum** mencakup seluruh bidang tugas Direksi.				
	44	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar pasal 16 tentang	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,493	100,00%	0,493

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			rapat Dewan Komisaris dan Pedoman Tata Kelola perusahaan yang Baik. • Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah memuat mengenai standar waktu kesegeraan pengambilan keputusan persetujuan atas usulan Direksi maksimal 7-14 hari kerja (tercantum di dalam Aspek Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris poin b. 11 halaman 28). • Sedangkan, *Board Manual* telah memuat mengenai standar waktu kesegeraan pengambilan keputusan atas usulan Direksi paling lambat 5 hari kalender setelah melakukan kajian atas materi atau menerima penjelasan tambahan dari Direksi. **<u>Kelemahan</u>** -				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	45	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS/Pemilik Modal.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar pasal 15 ayat 2b. • Dewan Komisaris telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun buku 2014, seperti yang tercantum di dalam Risalah Rapat internal Dewan Komisaris tanggal 13 Desember 2013 dengan agenda rapat: 1. Pembagian tugas Dewan Komisaris; 2. Penyusunan RKA Dewan Komisaris. • Rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris telah memuat program kerja Dewan Komisaris secara umum dan anggaran untuk tahun pelaksanaan 1 Januari sampai 31 Desember 2014.	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,493	100,00%	0,493

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			RKA Dewan Komisaris telah memuat indikator kinerja utama dan target-targetnya pencapaian. RKA Dewan Komisaris tersebut telah di sahkan ditandatangani oleh seluruh anggota Komisaris. • Program Kerja Dewan Komisaris telah disampaikan kepada Direksi dan dicantumkan ke dalam RKAP PT Sarinah (Persero) tahun buku 2014. • Dewan Komisaris telah menyampaikan Program Kerja Dewan Komisaris yang tercantum di dalam RKAP kepada Pemegang Saham untuk mendapat pengesahan. **Kelemahan** -				
	46	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan mengenai informasi yang	**Hambatan** -	0,493	100,00%	0,493

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		kewenangannya.	harus disediakan oleh Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar PT Sarinah (Persero) Pasal 11 ayat 2b (tentang kewajiban Direksi) dan Pasal 15 ayat 2a.1-4 (tentang kewenangan Dewan Komisaris). • Kebijakan terkait informasi yang harus disediakan oleh Direksi telah memuat substansi seperti: bentuk informasi yang disampaikan baik yang berkala maupun insidentil, standar waktu penyampaiannya dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi. • Berdasarkan konfirmasi, apabila Direksi tidak memenuhi kewajiban penyediaan informasi tersebut, maka akan dilaksanakan melalui forum rapat gabungan. **Kelemahan** -	**Rekomendasi** -			

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
15	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.				2,904	91,07%	2,645
	47	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.	**<u>Kekuatan</u>** • Dewan Komisaris memiliki kebijakan mekanisme pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat terhadap rancangan RJPP berdasarkan Anggaran Dasar pasal 15 ayat 2b.3 tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Komisaris serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG *Code*) halaman 27 poin tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris. • Dewan Komisaris telah melakukan telaah terhadap rancangan RJPP PT Sarinah (Persero) Tahun 2014-2018, berdasarkan risalah rapat internal Dewan Komisaris pada tanggal 8 Agustus 2014 dan telah memastikan	**<u>Hambatan</u>** • Belum adanya persamaan persepsi mengenai pentingnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran secara terinci. **<u>Rekomendasi</u>** • Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terkait proses persetujuan rancangan RJPP.	1,296	80,00%	1,037

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			hasil telaah rancangan RJPP dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi. • Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan melalui Surat Dewan Komisaris kepada Pemegang saham dengan No. 40/DEKOM/X/2014 tentang Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RJPP PT Sarinah (Persero) tahun 2014-2018. • *Assessor* menilai kualitas atas tanggapan Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP telah memadai. **Kelemahan** • Dewan Komisaris **belum** memiiki rencana kerja terkait proses persetujuan rancangan RJPP.				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	48	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan mekanisme pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat terhadap rancangan RKAP berdasarkan: 1. Anggaran Dasar PT Sarinah (Persero) Pasal 15 ayat 2b.2 dan 2b.3; 2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG *Code*) poin b aspek Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris. • Dewan Komisaris telah memiliki rencana kerja yang berkaitan dengan proses persetujuan rancangan RKAP yang disampaikan Direksi. • Dewan Komisaris telah melakukan telaah terhadap rancangan RKAP PT Sarinah (Persero), berdasarkan risalah rapat internal Dewan Komisaris pada tanggal 22 Juli 2014 dan Rapat Gabungan Dewan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	1,608	100,00%	1,608

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Komisaris dan Direksi tanggal 28 Mei 2014 dan 26 November 2014. • Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan melalui Surat dari Dewan Komisaris kepada Deputi Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN No. 51/DEKOM/XII/2013 perihal: Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RKAP PT Sarinah (Persero) tahun 2014 tertanggal 19 Desember 2013. • *Assessor* menilai kualitas atas Pendapat dan Saran atas RKAP yang disampaikan oleh Dewan Komisaris sudah cukup memadai. **<u>Kelemahan</u>** -				
16	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.				9,593	97,13%	9,318

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	49	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.	**Kekuatan** • Berdasarkan konfirmasi, Dewan Komisaris memiliki bahan bacaan/referensi yang memudahkan untuk memperbaharui pengetahuan tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Sarinah. • Dewan Komisaris telah melakukan telaah mengenai isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan, seperti yang tercantum dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris pada tanggal 13 Agustus dan 9 September 2014 dengan agenda pembahasan pengembangan *outlet* paseban dan rapat internal tanggal 22 September dan 6 Oktober 2014 dengan agenda rapat pengembangan *asset/outlet* Braga. Berdasarkan konfirmasi, proses telaah tersebut telah melibatkan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	1,100	100,00%	1,100

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Komite Audit. • Berdasarkan konfirmasi, tidak terdapat permasalahan/tantangan (ancaman dan peluang) yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan, yang tidak direspon oleh Dewan Komisaris. **Kelemahan** -				
	50	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *stakeholders* (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ataupun	**Kekuatan** • Berdasarkan konfirmasi, Dewan Komisaris telah memiliki mekanisme untuk melakukan pembahasan secara intensif terkait saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *stakeholders*. Mekanisme tersebut tercantum di dalam kebijakan *Whistleblowing System* yang dimiliki Perusahaan. • Berdasarkan konfirmasi, Dewan Komisaris menyatakan telah	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,789	100,00%	0,789

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		penyampaian oleh Direksi.	melakukan pembahasan secara intensif terkait saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *stakeholders*. • Berdasarkan konfirmasi, Dewan Komisaris telah menyampaikan saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *stakeholders* kepada Direksi disampaikan melalui surat-menyurat dan rapat gabungan. • Berdasarkan konfirmasi, Proses pembahasan atas saran, permasalahan atau keluhan *stakeholder* yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). • Berdasarkan konfirmasi, tidak terdapat permasalahan hubungan dengan *stakeholders* yang berdampak pada kinerja perusahaan, yang tidak dibahas				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			dalam rapat Dewan Komisaris. **Kelemahan** -				
	51	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya yang diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Sarinah (Persero) tahun 2014 poin b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris di halaman 28. • Dewan Komisaris telah memiliki rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris.	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	1,100	100,00%	1,100

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			• Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya melalui laporan Komite Audit yang dibahas pada rapat Dewan Komisaris dengan Komite Audit pada tanggal 3 Maret 2014 dengan agenda pemberian tanggapan terkait dengan Tindak Lanjut Hasil Audit Rutin SPI atas Divisi Perdagangan (disposisi Dewan Komisaris kepada Komite Audit). • Dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris dan Komite Audit telah memberikan arahan tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern kepada Direksi. • *Assessor* menilai bahwa kualitas atas arahan Dewan Komisaris tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern telah memadai.				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan -				
	52	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris memiliki kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya yang diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Sarinah (Persero) tahun 2014 poin b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris di halaman 28. • Dewan Komisaris melalui Komite Investasi dan Risiko Usaha telah memiliki rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya yang dimuat dalam Program Kerja Komite Investasi dan Risiko Usaha PT Sarinah. • Dewan Komisaris telah melakukan	**Hambatan** - **Rekomendasi** • Dewan Komisaris sebaiknya memberikan arahan terkait peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajamen risiko perusahaan secara menyeluruh atau tersistem.	1,100	95,00%	1,045

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			telaah atas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya antara lain analisis risiko terkait pengembangan usaha (sebagai contoh, pengembangan *outlet* Paseban, Malang) yang dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Investasi dan Risiko Usaha (KIRU) yang tercantum pada Risalah rapat internal Dewan Komisaris tanggal 13 Agustus 2014. • *Assessor* menilai bahwa kualitas atas arahan Dewan Komisaris tentang manajemen risiko telah memadai. **<u>Kelemahan</u>** • Dewan Komisaris belum secara menyeluruh (tersistem) memberikan arahan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko.				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	53	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan mengenai pemberian nasihat/pengawasan dan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan yang diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Sarinah (Persero) tahun 2014 poin b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris di halaman 28. • Dewan Komisaris telah melakukan telaah terhadap kebijakan sistem informasi teknologi perusahaan, yang termuat di dalam risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 12 Februari 2014 dengaan salah satu agenda rapat adalah membahas pengembangan sistem informasi dan teknologi PT Sarinah (Persero). • Dalam Rapat Gabungan tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi diantaranya terkait keamanan sistem IT Sarinah,	**Hambatan** • Belum adanya persamaan persepsi mengenai pentingnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran secara terinci. **Rekomendasi** • Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksaaan sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.	1.100	95.00%	1.045

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			penyediaan *wifi* gratis di *public service*, sistem IT pada pelayanan publik dan konten *website* Sarinah. • *Assessor* menilai bahwa kualitas atas arahan Dewan Komisaris tentang sistem teknologi informasi cukup memadai. **Kelemahan** • Program Kerja Dewan Komisaris yang tercantum di dalam RKAP **belum secara spesifik** memuat rencana kerja mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksaaan sistem teknologi informasi yang digunakan Perusahaan.				
	54	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir di perusahaan, sistem dan prosedur promosi,	**Hambatan** • Belum adanya persamaan persepsi mengenai pentingnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran secara terinci.	1,101	95,00%	1,046

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			mutasi dan demosi di perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut yang diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Sarinah (Persero) tahun 2014 poin b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris di halaman 28. • Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir di perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut melalui 1. Risalah rapat 8 Agustus 2014, dengan salah satu agenda rapat adalah pembahasan masalah SDM; 2. Risalah rapat 4 Desember 2014, dengan salah satu agenda rapat adalah pembahasan masalah SDM. • Dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang peningkatan efektivitas	**<u>Rekomendasi</u>** • Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap mengenai kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan tersebut.			

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			suksesi manajemen kepada Direksi. • *Assessor* menilai bahwa kualitas atas arahan Dewan Komisaris tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya telah memadai. **Kelemahan** • Program Kerja Dewan Komisaris yang tercantum di dalam RKAP **belum secara spesifik** memuat rencana kerja megenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan tersebut.				
	55	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diatur/tercantum dalam Rencana	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	1,101	100,00%	1,101

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kerja Komite Audit tahun 2014. • Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah memiliki rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan melalui Program Kerja Tahunan Komite Audit PT Sarinah (Persero) Tahun 2014. • Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia melalui setiap rapat internal Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, serta rapat Komite Audit yang membahas tentang Laporan Kinerja Usaha bulanan, format Laporan Keuangan, dan Laporan Keuangan tahun 2014. Dewan Komisaris juga telah melakukan telaah terhadap Laporan Keuangan tahun buku 2013 dan memberikan tanggapan melalui surat Nomor: 10/DEKOM/III/2014				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			tanggal 21 Maret 2014 perihal Tanggapan Dewan Komisaris Atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2013. • Dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang peningkatan penerapan kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan kepada Direksi. • *Assessor* menilai bahwa kualitas atas saran Dewan Komisaris atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya telah memadai. **Kelemahan** -				
	56	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa yang tercantum di dalam GCG *Code* pada aspek Tugas, Wewenangan dan Kewajiban Dewan	**Hambatan** • Belum adanya persamaan persepsi mengenai pentingnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran secara terinci.	1,101	95,00%	1,046

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Komisaris poin no. 8 halaman 28. • Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya melalui Risalah rapat tanggal 13 Agustus 2014 dengan salah satu agenda rapat adalah pembahasan pembelian aset PT Sadean Intramitra di malang. Dewan Komisaris telah memberikan saran berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan melalui Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama dengan no surat: No. 07/DEKOM/VIII/2014 perihal persetujuan pembelian asset milik PT Sadean Intramitra di Malang. • *Assessor* menilai bahwa kualitas atas saran Dewan Komisaris mengenai kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya telah cukup memadai.	**Rekomendasi** • Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.			

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan • Program Kerja Dewan Komisaris yang tercantum di dalam RKAP **belum secara spesifik** memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya dalam rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.				
	57	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan yang tercantum di dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG *Code*) pada aspek Tugas, Wewenangan dan Kewajiban Dewan Komisaris poin no. 8 halaman 28. • Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya melalui rapat internal Dewan Komisaris tanggal 13 Agustus 2014 yang antara lain membahas tentang	**Hambatan** • Belum adanya persamaan persepsi mengenai pentingnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran secara terinci. **Rekomendasi** • Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan	1,101	95,00%	1,046

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			pengembangan *outlet* Paseban. • Dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang peningkatan efektivitas mutu dan pelayanan kepada Direksi. • *Assessor* menilai bahwa kualitas atas saran Dewan Komisaris mengenai kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya telah memadai. **Kelemahan** • Program Kerja Dewan Komisaris yang tercantum di dalam RKAP **belum secara spesifik** memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya dalam rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.	pelayanan serta pelaksanaannya.			
17	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan				6,479	98,29%	6,368

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	kebijakan perusahaan.						
	58	Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat dengan pihak ketiga yang diatur dalam Anggaran Dasar pasal 15 tentang tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris serta dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*GCG Code*) halaman 28 poin b no. 7. • Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemberian nasihat atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-	**Hambatan** • Belum adanya persamaan persepsi mengenai pentingnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran secara terinci. **Rekomendasi** • Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, serta terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat dengan pihak ketiga.	1,417	96,43%	1,366

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat dengan pihak ketiga melalui setiap rapat internal Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, dan rapat Komite Audit. • Dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi. • *Assessor* menilai kualitas pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta perjanjian dengan pihak ketiga telah memadai. • Berdasarkan konfirmasi, jika terjadi pelanggaran oleh Direksi, Dewan Komisaris akan melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kepada Pemegang				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Saham/ RUPS. • Berdasarkan konfirmasi, tidak terdapat permasalahan mengenai pelanggaran, yang tidak dibahas oleh Dewan Komisaris. **Kelemahan** • Program Kerja Dewan Komisaris yang tercantum di dalam RKAP **belum secara spesifik** memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, serta terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat dengan pihak ketiga.				
	59	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan untuk memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP yang diatur dalam	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	1,106	100,00%	1,106

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Anggaran Dasar pasal 15 ayat 1, serta dalam *Board Manual* bab II poin 2.1, halaman 6 tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisaris. • Dewan Komisaris telah memiliki rencana evaluasi terhadap pelaksanaan RKAP yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2014 dengan salah satu program kerja Dewan Komisaris adalah melaksanakan rapat dengan Direksi yang agendanya antara lain membahas/mengevaluasi kinerja bulanan dan triwulanan serta laporan tahunan. • Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi pencapaian perusahaan yang mencakup kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			melalui setiap rapat internal Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, serta Komite Audit yang membahas pencapaian kinerja usaha setiap bulannya serta Laporan dan Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan PT Sarinah (Persero) tahun buku 2014, No: 12/DEKOM/IV/2015 yang disampaikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 23 April 2015. • Berdasarkan pemeriksaan dokumen, Dewan Komisaris telah menandatangani Laporan Manajemen Triwulan I pada tanggal 28 April 2014, Semester I pada tanggal 22 Juli 2014, Triwulan III pada tanggal 31 Oktober 2014 dan Laporan Manajemen Tahunan pada tanggal 31 Maret 2015. • Dewan Komisaris juga telah melaporkan hasil				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			evaluasi/pembahasan laporan manajemen melalui Surat Dewan Komisaris No: 13/DEKOM/IV/2015 perihal Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja PT Sarinah (Persero) tahun 2014 tertanggal 23 April 2015. • *Assessor* menilai kualitas atas evaluasi Dewan Komisaris atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan kesesuaian denngan RKAP dan/atau RJPP telah memadai. • Berdasarkan telaah dokumen, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja PT Sarinah (Persero) telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan berdasarkan konfirmasi proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris juga melibatkan Komite Audit.				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan -				
	60	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau RUPS/Pemilik Modal.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki mekanisme mengenai pemberian persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 11, ayat 8, halaman 27 dan *Board Manual* PT Sarinah (Persero) Bab 5.2, halaman 57 tentang Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Komisaris. • Dewan Dewan Komisaris telah membahas atau memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemilik Modal. Pembahasan dilakukan	**Hambatan** • Belum adanya persamaan persepsi mengenai pentingnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran secara terinci. **Rekomendasi** • Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik membahas atau memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemegang Saham.	0,966	93,75%	0,906

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			melalui setiap rapat internal Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, sedangkan persetujuan diberikan melalui Surat Dewan Komisaris No. 41/DEKOM/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal persetujuan atas pendayagunaan aset tetap dalam rangka pemindahtanganan aset milik PT Sarinah (Persero) di Jl. Braga, Bandung. • Dewan Komisaris juga telah memberikan otorisasi atau rekomendasi atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemilik Modal melalui surat, antara lain: 1. Surat Dewan Komisaris No. 07/DEKOM/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 kepada Direktur Utama perihal persetujuan atas Penghapusan barang *Broken Stock* tahun 2013;				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			2. Surat Dewan Komisaris No. 14/DEKOM/IV/2014 tanggal 11 April kepada Direktur Utama perihal Penetapan bonus karyawan tahun buku 2013; 3. Surat Dewan Komisaris No. 19/DEKOM/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 kepada Direktur Utama perihal izin pengajuan kredit; 4. Surat Dewan Komisaris No. 41/DEKOM/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal persetujuan atas pendayagunaan aset tetap dalam rangka pemindahtanganan aset milik PT Sarinah (Persero) di Jl. Braga, Bandung. • Sebagian besar pemberian otorisasi atau rekomendasi oleh Dewan Komisaris telah dilakukan tepat waktu.				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan • Dewan Komisaris **belum secara spesifik** memiliki rencana kerja untuk membahas atau memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemegang Saham.				
	61	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan calon auditor eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal, serta penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal berdasarkan Anggaran Dasar pasal 15 ayat 2b, dan *Chart*er Komite Audit PT Sarinah (Persero) tahun 2008 (poin Audit Eksternal no. 1). • Dewan Komisaris telah memiliki rencana kerja terkait penunjukan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,778	100,00%	0,778

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			calon auditor dan anggaran biaya audit eksternal yang dimuat dalam Rencana Aksi Komite Audit tahun 2014 yang menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2014. • Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan arahan Pemegang Saham dalam risalah RUPS Nomor: 332.1/DIREKSI/E/III/2014 tentang Peersetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2013. • Dewan Komisaris telah menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal terkait penunjukan calon auditor eksternal melalui Surat Dewan Komisaris No. 38/DEKOM/IX/2014 tanggal 18 September 2014 kepada Direksi perihal persetujuan penunjukkan				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			kembali KAP Husni, Mucharam & Rasidi untuk mengaudit Laporan Keuangan PT Sarinah (Persero) tahun buku 2014 tembusan ke Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan. • Dewan Komisaris juga telah melakukan evaluasi atas kinerja auditor eksternal sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku melalui rapat Komite Audit pada tanggal 13 Agustus 2014 dengan agenda rapat *review* dokumen KAP. **Kelemahan** -				
	62	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif, serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang	**Kekuatan** • Dewan Komisaris memiliki kebijakan terkait pengawasan terhadap efektivitas audit eksternal dan audit internal serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	1,106	100,00%	1,106

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris.	dengan BUMN berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*GCG Code*)dan Piagam Komite Audit poin C.1 tentang tugas Komite Audit. • Dewan Komisaris melalui Komite Audit memiliki rencana kerja terkait pengawasan terhadap efektivitas audit eksternal dan audit internal serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang dimuat dalam *Charter* Komite Audit dan Program Kerja Komite Audit Tahun 2014. • Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melaksanakan penilaian atas efektivitas audit eksternal dan audit internal serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN melalui rapat Komite audit pada tanggal 3 Maret 2014 dan laporan tanggapan Komite Audit atas tindak lanjut hasil				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			audit Divisi perdagangan (Disposisi Komisaris Utama). • Dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit internal dan audit eksternal. **Kelemahan** -				
	63	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan dengan segera kepada RUPS/Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait pelaporan kepada RUPS/Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar pasal 15 ayat 2b. • Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan melalui setiap rapat internal Dewan Komisaris dan rapat Dewan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	1,106	100,00%	1,106

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Komisaris dengan Direksi yang membahas pencapaian kinerja usaha setiap bulannya termasuk tidak tercapainya target dan/atau penurunan kinerja perusahaan. • Berdasarkan konfirmasi, pada 2014 tidak terdapat gejala penurunan kinerja, sehingga tidak terdapat laporan Dewan Komisaris kepada RUPS/Pemilik Modal tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan yang signifikan dan pemberian saran-saran perbaikan yang telah disampaikan kepada Direksi untuk mengatasi permasalahan tersebut. • *Assessor* menilai kualitas atas arahan langkah-langkah perbaikan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi telah memadai. **<u>Kelemahan</u>** -				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
18	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/perusahaan patungan.				1,504	50,88%	0,765
	64	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.	**Kekuatan** - **Kelemahan** • Dewan Komisaris **belum** memiliki rencana pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Anak Perusahaan/ perusahaan patungan. • Dewan Komisaris **belum** melakukan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan perusahaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya. • Dikarenakan **belum** terdapat dokumen terkait pembahasan dan pemberian nasihat/arahan Dewan	**Hambatan** • Belum adanya persamaan persepsi mengenai pentingnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran secara terinci. **Rekomendasi** • Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap terhadap pengelolaan Anak Perusahaan/perusahaan patungan. • Dewan Komisaris agar	0,985	25,00%	0,246

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Komisaris mengenai pengelolaan Anak Perusahaan, maka *assessor* **<u>tidak dapat</u>** menilai Kualitas atas hasil evaluasi pengelolaan anak perusahaan.	melakukan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan dan pelaksanaannya.			
	65	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Anak Perusahaan /perusahaan patungan.	**<u>Kekuatan</u>** • Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai peran Dewan Komisaris dalam pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan/perusahan patungan yang tercantum di dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 Pedoman Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Anak BUMN. • Dewan Komisaris perusahaan telah melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak	**<u>Hambatan</u>** - **<u>Rekomendasi</u>** -	0.519	100.00%	0.519

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			perusahaan/perusahaan patungan, berdasarkan Surat Dewan Komisaris No: 02/DEKOM/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 terkait persetujuan pengangkatan Calon Direksi dan Dewan Komisaris PT Sari Valuta Asing, berdasarkan surat Surat Direksi Sarinah No.206/DIREKSI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan *Fit and Proper Test* Calon Direksi dan Dewan Komisaris PT Sari Valuta Asing. • Penetapan tertulisterhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan dilakukan oleh Kementerian BUMN berdasarkan Surat Menteri BUMN No: S-181/MBU/04/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Persetujuan Pengangkatan Komisaris dan Direksi PT Sari Valuta Asing.				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan -				
19	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial), dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.				2,438	84,28%	2,055
	66	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi yang tercantum di dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang persyaratan Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi BUMN. • Dewan Komisaris telah melakukan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,502	100,00%	0,502

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi, melalui Risalah rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 28 Mei 2014 dengan salah satu agenda penunjukkan Plt. Direktur Utama dan Plt. Direktur Operasi. • Dewan Komisaris telah mengajukan usulan calon-calon anggota Direksi ke RUPS. **Kelemahan** -				
	67	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan mengenai penilaian kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal. • Dewan Komisaris telah memiliki rencana pemantauan kinerja Direksi	**Hambatan** - **Rekomendasi** • Dewan Komisaris sebaiknya melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara individu dan menyampaikan hasil	0,968	66,67%	0,645

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			dan pelaporan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2014. • Dewan Komisaris telah melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara kolegial dalam forum rapat gabungan dengan Direksi, seperti yang tercantum di dalam Risalah rapat tanggal 13 Agustus dengan salah satu agenda adalah pembahasan kinerja PT Sarinah (Persero) Semester 1. • Dewan Komisaris telah menyampaikannya kepada RUPS/Pemilik Modal melalui surat Dewan KomisarisNomor: 34/DEKOM/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Laporan Dewan Komisaris atas Kinerja PT Sarinah (Persero) Semester I tahun 2014, dan surat Dewan Komisaris Nomor: 51/DEKOM/XI/2014 tanggal	penilaian kinerja Direksi tersebut kepada Pemegang Saham/RUPS.			

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			28 November 2014 perihal Laporan Dewan Komisaris atas Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2014 PT Sarinah (Persero). **Kelemahan** • Dewan Komisaris **belum** melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara individu dan menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi tersebut kepada RUPS.				
	68	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan mengenai pengusulan remunerasi Direksi yang mengacu kepada PER-04/MBU/2014 tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. • Dewan Komisaris telah melakukan telaah terhadap pengusulan remunerasi Direksi melalui Surat Dewan Komisaris No.	**Hambatan** • Belum adanya persamaan persepsi mengenai pentingnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran secara terinci. **Rekomendasi** • Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat	0,968	93,75%	0,908

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			10/DEKOM/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan Tahun buku 2013 PT Sarinah (Persero) ditujukan kepada Pemegang Saham. • Melalui surat tersebut Dewan Komisaris juga telah melakukan penyampaian usulan tentang remunerasi Direksi, berdasarkan surat tersebut Dewan Komisaris memberikan usulan terkait pemberian tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp.1.058.880.000 yang sudah dianggarkan dalam RKAP 2013. **Kelemahan** • Program Kerja Dewan Komisaris yang tercantum di dalam RKAP **belum secara spesifik** memuat rencana kerja untuk menelaah pengusulan remunerasi Direksi.	rencana pengawasan dan pemberian nasihat terkait pengusulan remunerasi Direksi.			

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
20	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.				0,571	50,00%	0,286
	69	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut.	**<u>Kekuatan</u>** • Dewan Komisaris memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar pasal 13 dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG *Code*). • Dewan Komisaris telah menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan (Pernyataan Independensi) pada awal pengangkatan. • Dewan Komisaris telah menyusun Daftar Khusus mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Sarinah dan perusahaan lain.	**<u>Hambatan</u>** - **<u>Rekomendasi</u>** • Dewan Komisaris sebaiknya melakukan pembaharuan pernyataan benturan kepentingan setiap tahunnya melalui penandatanganan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. • Dewan Komisaris sebaiknya menyertakan pernyataan benturan kepentingan dalam usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi Dewan Komisaris dan	0,571	50,00%	0,286

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan • Dewan Komisaris **belum** melakukan pembaharuan pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan setiap awal tahun. • Dewan Komisaris **belum** membuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS/Pemilik Modal.	persetujuan RUPS/Pemilik Modal.			
21	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.				1,659	86,13%	1,429
	70	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara	**Kekuatan** • Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan pedoman untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik yang diatur dalam	**Hambatan** • Belum adanya persamaan persepsi mengenai pentingnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran	93,75%	0,923	0,985

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		efektif dan berkelanjutan.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG *Code*) Bab III Kebijakan Perusahaan poin 7 Pengawasan Terhadap Pengawasan GCC halaman 61. • Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik, yang meliputi menelaah laporan hasil *assessment/review* GCG, GCG *Code* dan kebijakan lainnya terkait GCG, serta laporan GCG yang diungkapkan dalam laporan tahunan. • Dewan Komisaris telah menindaklanjuti *area of improvement* hasil *assessment/review* GCG yang menjadi kewenangannya, tecantum di dalam laporan hasil evaluasi *asessment* GCG PT Sarinah (Persero) periode tahun 2012 (*monitoring* April 2015).	secara terinci. **<u>Rekomendasi</u>** • Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terkait penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.			

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan • Program Kerja Dewan Komisaris yang tercantum di dalam RKAP **belum secara spesifik** memuat rencana kerja untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.				
	71	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris yang termuat di dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG *Code*) Bab II Organ perusahaan, poin no.2. tentang Dewan Komisaris, uraian mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris. • Dewan Komisaris telah memiliki indikator pencapaian kinerja serta hasil penilaian/evaluasi pencapaian KPI tersebut yang termuat di dalam	**Hambatan** - **Rekomendasi** • Dewan Komisaris sebaiknya melakukan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris, baik melalui rapat Dewan Komisaris ataupun lainnya.	0,674	75,00%	0,506

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Laporan Tahunan Dewan Komisaris tahun 2014 yang telah ditanda tangani oleh seluruh anggota Komisaris. • Dewan Komisaris telah menyampaikan penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui Laporan Tahunan Dewan Komisaris tahun 2014 yang menjadi lampiran dari Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja PT Sarinah (Persero) tahun 2014 tertanggal 23 April 2015. **Kelemahan** • Dewan Komisaris **belum** melakukan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris, baik melalui rapat Dewan Komisaris ataupun lainnya.				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
22	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				1,349	78,04%	1,053
	72	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki pedoman/tata tertib rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang memadai.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris memiliki pedoman/tata tertib rapat yang diatur dalam Anggaran Dasar PT Sarinah (Persero) Pasal 16 mengenai Rapat Dewan Komisaris dan *Board Manual*. Pedoman etika rapat tersebut telah memuat etika rapat dan tata penyusunan risalah rapat. **Kelemahan** • Pedoman etika rapat **belum** mengatur tentang pelaksanaan evaluasi atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya serta pembahasan atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait	**Hambatan** - **Rekomendasi** • Dewan Komisaris sebaiknya menambahkan ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan evaluasi atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya serta pembahasan atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait usulan Direksi pada bagian rapat Dewan Komisaris dalam *Board Manual* atau pedoman	0,346	50,00%	0,173

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			usulan Direksi.	lainnya.			
	73	Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki rencana penyelenggaraan rapat internal Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi yang dimuat dalam Rencana Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2014. • Pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi telah sesuai dengan yang direncanakan. Selama 2014, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris, rapat dengan Komite dan rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi seluruhnya sebanyak 26 kali. • Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris.	**Hambatan** - **Rekomendasi** • Dewan Komisaris sebaiknya memberikan surat kuasa serta penjelasan secara tertulis jika Dewan Komisaris yang bersangkutan berhalangan hadir dalam rapat.	0,657	81,25%	0,534

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan • Dewan Komisaris yang berhalangan hadir dalam rapat **belum seluruhnya** memberikan surat kuasa serta penjelasan ketidakhadiran dalam rapat.				
	74	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris senantiasa melakukan evaluasi atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya. Hal ini dapat dilihat melalui risalah rapat internal Dewan Komisaris dan risalah rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi. • Berdasarkan konfirmasi, hasil rapat Dewan Komisaris sebelumnya telah ditindak lanjuti seluruhnya. **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
23	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.				2,593	100,00%	2,593
	75	Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki uraian tugas yang jelas.	**Kekuatan** • Sekretaris Dewan Komisaris telah memiliki uraian tugas yang termuat di dalam SK pengangkatan Sekretaris dan Staf Dewan Komisaris tertulis bahwa Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris dan Staf Dewan Komisaris sesuai dengan yang tercantum pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 001/DEKOM/Kep/V/2004 tanggal 3 Mei 2004 dan GCG *Code* aspek 4 serta terdapat pada Organ pendukung poin no. 2. • Tugas Pokok dan fungsi sekretariat Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) telah tercantum di dalam Board Manual pada Bab II poin 2.4.2,	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,804	100,00%	0,804

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			telah mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris; 2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya; 3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan (a) *monitoring* tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris; (b) Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan; (c) Dukungan administrasi serta				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi; 4. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris. **Kelemahan** -				
	76	Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen.	**Kekuatan** • Berdasarkan konfirmasi, Sekretaris Dewan Komisaris telah memiliki fasilitas untuk menyimpan dokumen Dewan Komisaris yang disediakan oleh Perusahaan.	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,337	100,00%	0,337

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			• Sekretaris Dewan Komisaris telah mengadministrasikan surat masuk dan surat keluar Dewan Komisaris, serta dokumen lainnya dengan baik dan tertib. **Kelemahan** -				
	77	Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.	**Kekuatan** • Sekretaris Dewan Komisaris telah mengadministrasikan undangan rapat Dewan Komisaris dengan baik sehingga seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak lain yang diundang dalam rapat menerima undangan. • Bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat terkait telah disediakan dan disampaikan kepada peserta rapat secara tepat waktu. • Pendokumentasian atas hasil rapat Dewan Komisaris juga telah	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,959	100,00%	0,959

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			dilakukan secara memadai sesuai dengan ketentuan dalam *Board Manual* dan tata tertib rapat Dewan Komisaris. **Kelemahan** -				
	78	Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	**Kekuatan** • Sekretaris Dewan Komisaris telah mengadministrasikan data/informasi/materi yang berkaitan dengan: 1. *Monitoring* tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi, dan arahan dari Dewan Komisaris, 2. Laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan, serta 3. Dukungan administrasi dan *monitoring* yang berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,493	100,00%	0,493

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. **Kelemahan** -				
24	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.				2,438	100,00%	2,438
	79	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	**Kekuatan** • Dewan Komisaris telah memiliki Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit diketuai oleh Ibu Luizah yang merupakan anggota Dewan Komisaris serta beranggotakan Shinta Rahma Diana dan Rafi Rakhmadhan yang diangkat	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,643	100,00%	0,643

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Nomor: 2/DEKOM/Kep./X/2014 tanggal 22 Oktober 2014. Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit Perusahaan Perseroan PT Sarinah(Persero). • Dewan Komisaris telah memiliki komite lain yaitu Komite Investasi dan Risiko Usaha untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. • Ketua maupun Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. • Ketua Komite Audit Ibu Luziah dan Ketua Komite Investasi dan Risiko Usaha Bpk. Mualimin Abdi, keduanya merupakan anggota Komisaris PT Sarinah (Persero). **<u>Kelemahan</u>** -				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	80	Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi komite dan independensi dari masing-masing komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	**Kekuatan** • Anggota Komite Audit memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing komite. Hal ini dapat dilihat dari CV salah satu anggota Komite Audit. Ibu Shinta Rahma Diana sebagai anggota Komite Audit merupakan lulusan S1 dan S2 jurusan *accounting* dan telah mengikuti beberapa sertifikasi terkait *accounting*. Saat ini juga bekerja sebagai staff pengajar di UPI YAI, STIE YAI. • Salah satu anggota Komite Audit yang bukan berasal dari Dewan Komisaris berasal dari pihak luar Sarinah. • Berdasarkan konfirmasi, jumlah keanggotaan Komite Audit yang berasal dari luar Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,488	100,00%	0,488

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan -				
	81	Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki piagam/*charter* dan program kerja tahunan.	**Kekuatan** • Komite Audit telah memiliki *Charter* Komite Audit PT Sarinah (Persero) yang di tandatangani oleh Komisaris Utama dan disahkan pada 16 januari 2008. • Berdasarkan konfirmasi, muatan *Charter* Komite Audit dan Charter Komite Investasi dan Risiko Usaha telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai kebutuhan. • Program kerja Komite Audit Tahun 2014 telah memuat poin (1) memastikan efektivitas sistem pengendalian manajemen (internal) dan pelaksanaannya, (2) efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan SPI, serta (3) menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal dan SPI.	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,643	100,00%	0,643

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan -				
	82	Komite Audit melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	**Kekuatan** • Komite Audit dan Komite Investasi dan Risiko Usaha telah melaksanakan pertemuan berkala serta kegiatan lain yang direncanakan dalam Program Kerja masing-masing komite untuk tahun 2014. • Komite Audit dan Komite Investasi dan Risiko Usaha (KIRU) telah memiliki risalah rapat untuk setiap rapat Komite Audit dan KIRU, baik yang merupakan rapat internal Komite Audit, maupun rapat Komite Audit yang mengundang pihak lain, yang diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris. **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,332	100,00%	0,332

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	83	Komite melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	**Kekuatan** • Komite Audit dan Komite Investasi dan Risiko Usaha telah menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan disertai rekomendasi, diantaranya tercantum di dalam: 1. Laporan Kegiatan Komite Investasi dan Risiko Usaha yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor: 3/LKIRU/2014 pada bulan April 2014; 2. Laporan tanggapan Komite Audit atas tindak lanjut hasil audit Divisi perdagangan (Disposisi Komisaris Utama) pada tanggal 3 Maret 2014. **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,332	100,00%	0,332
	JUMLAH ASPEK III				**35,000**	**91,55%**	**32,047**

KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG

PT SARINAH (PERSERO)

ASPEK IV:
DIREKSI

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
25	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.				1,089	90,48%	0,985
	84	Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	**Kekuatan** • Sarinah telah memiliki pedoman terkait program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat yang dimuat dalam *Board Manual* halaman 43 poin 4.1.4 tentang Program Pengenalan Perseroan Kepada Pejabat Baru Pada Organ Perseroan. • Berdasarkan pedoman tersebut, anggota Direksi yang baru diangkat telah mengikuti program	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,467	100,00%	0,467

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			pengenalan Perusahaan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014. • Pelaksanaan program pengenalan perusahaan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi. **Kelemahan** -				
	85	Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.	**Kekuatan** • Sarinah telah memiliki kebijakan tentang pelatihan anggota Direksi yang diatur dalam Pedoman GCG halaman 44 tentang Tanggung Jawab Umum Direksi. • Berdasarkan kebijakan tersebut, Perusahaan menyusun anggaran untuk pelatihan bagi anggota Direksi dalam Revisi RKAP Tahun 2014 PT Sarinah (Persero). • Selama tahun 2014, Direksi telah mengikuti pelatihan dan telah	**Hambatan** • Kebutuhan jenis pelatihan anggota Direksi belum dapat ditentukan secara spesifik. **Rekomendasi** • Direksi agar menyusun rencana kerja terkait pelatihan Direksi secara terinci.	0,622	83,33%	0,518

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			dilaporkan dalam Laporan Tahunan 2014 PT Sarinah (Persero) halaman 145-146 tentang Program Orientasi dan Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi. **Kelemahan** • Berdasarkan konfirmasi, rencana kerja untuk pelatihan bagi anggota Direksi **belum** dapat disusun secara spesifik.				
26	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.				1,867	74,99%	1,400
	86	Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.	**Kekuatan** • Direksi telah menetapkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan yang terdapat dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 036/KPTS/DIREKSI/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Sarinah	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,622	100,00%	0,622

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			(Persero). • Keputusan Direksi tentang struktur organisasi tersebut telah diajukan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Direksi Nomor: 776/DIREKSI/I/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Struktur Organisasi PT Sarinah (Persero), serta telah disetujui Dewan Komisaris berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor: 32/DEKOM/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Persetujuan Struktur Organisasi PT Sarinah (Persero). • Direksi telah menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi yang terdapat dalam *Board Manual* bab III tentang Direksi. • Direksi juga telah menetapkan deskripsi dan spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk setiap				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			jabatan dalam struktur organisasi yang diatur dalam Uraian Jabatan PT Sarinah (Persero). **Kelemahan** -				
	87	Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (*core business*) perusahaan.	**Kekuatan** • Sarinah telah memiliki sistem dan prosedur untuk seluruh proses bisnis inti Perusahaan yang antara lain dimuat dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Sistem dan Prosedur PT Sarinah (Persero), serta Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 38.1/KPTS/DIREKSI/IX/2014 tanggal 5 September 2014 perihal Sistem dan Prosedur Atas Proses Bisnis PT Sarinah (Persero) yang Berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul .	**Hambatan** • Belum terdapat persamaan persepsi tentang kebutuhan pedoman penyusunan sistem dan prosedur (SOP) di Perusahaan. **Rekomendasi** • Direksi agar menyusun kebijakan tentang pedoman penyusunan sistem dan prosedur (SOP) di Perusahaan.	0,778	80,00%	0,622

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			• Berdasarkan konfirmasi, sistem dan prosedur tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan, antara lain melalui internal memo dan intranet. • Sistem dan prosedur tersebut telah dilaksanakan secara konsisten. • Direksi juga senantiasa melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara berkala. **Kelemahan** • Sarinah **belum** memiliki kebijakan tentang pedoman penyusunan sistem dan prosedur di Perusahaan.				
	88	Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (*corporate action*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.	**Kekuatan** • Sarinah memiliki Anggaran Dasar dan *Board Manual* yang mengatur tentang mekanisme pengambilan keputusan Direksi secara formal, yaitu pengambilan keputusan melalui rapat Direksi atau pengambilan keputusan di luar rapat	**Hambatan** • Belum terdapat persamaan persepsi tentang kebutuhan penambahan poin terkait aturan mengenai standar waktu kesegeraan pengambilan keputusan Direksi dan	0,467	15,57%	0,073

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			(melalui sirkuler dan lain-lain. • Sarinah juga memiliki Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 015/KPTS/DIREKSI/III/2010 tentang Batasan Kuasa Tanda Tangan Dokumen yang mengatur tentang mekanisme pengambilan keputusan Direksi secara formal di luar rapat Direksi. **Kelemahan** • *Board Manual* **belum** mengatur mengenai standar waktu kesegeraan pengambilan keputusan dan pengkomunikasian keputusan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut.	pengkomunikasiannya kepada pihak terkait dalam *Board Manual.* **Rekomendasi** • *Board Manual* agar diperbaharui dan menambahkan poin terkait aturan mengenai standar waktu kesegeraan pengambilan keputusan Direksi dan pengkomunikasiannya kepada pihak terkait.			
27	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.				4,044	97,02%	3,924
	89	Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh	**Kekuatan** • Sarinah telah memiliki kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan	**Hambatan** -	0,778	100,00%	0,778

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		RUPS/Pemilik Modal.	RJPP yang dimuat dalam *Board Manual* pada poin 5.1.3 tentang Penyelenggaraan RUPS Tahunan Dalam Rangka Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, serta dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 38.1/KPTS/DIREKSI/IX/2014 tanggal 5 September 2014 perihal Sistem dan Prosedur Atas Proses Bisnis PT Sarinah (Persero) yang Berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul yang antara lain memuat Prosedur Pengelolaan Perencanaan Jangka Panjang Perusahaan. • Berdasarkan kebijakan tersebut, Sarinah telah memiliki Rencana Jangka Panjang PT Sarinah (Persero) Tahun 2014-2018. • RJPP telah melalui proses telaah oleh Direksi dan tim penyusun RJPP yang antara lain dapat dilihat pada risalah rapat Direksi. • RJPP yang telah direvisi tersebut	**Rekomendasi** -			

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Surat Direksi kepada Menteri BUMN RI Nomor: 987/DIREKSI/E/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 perihal RJP PT Sarinah (Persero) Tahun 2014-2018. • Berdasarkan konfirmasi, Direksi telah menyosialisasikan isi RJPP kepada seluruh karyawan Perusahaan. **Kelemahan** -				
	90	Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Menteri/Pemilik Modal.	**Kekuatan** • Sarinah telah memiliki kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan RKAP yang dimuat dalam *Board Manual* pada poin 5.1.1 tentang Penyelenggaraan RUPS Tahunan Dalam Rangka Pengesahan RKAP, serta dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 38.1/KPTS/DIREKSI/IX/2014 tanggal	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,778	100,00%	0,778

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			5 September 2014 perihal Sistem dan Prosedur Atas Proses Bisnis PT SARINAH (Persero) yang Berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul yang antara lain memuat Prosedur Pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. • Berdasarkan kebijakan tersebut, Sarinah telah memiliki Revisi RKAP Tahun 2014 PT Sarinah (Persero) yang merupakan penjabaran tahunan dari RJPP. • RKAP telah melalui proses telaah oleh Direksi dan tim penyusun RKAP yang antara lain dapat dilihat pada risalah rapat Direksi serta risalah rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. • Berdasarkan Tanda Terima Penyampaian RKAP 2014 tanggal 16 Oktober 2013, Direksi telah menyampaikan Rancangan RKAP kepada Pemegang Saham sesuai dengan jadwal waktu yang				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			ditentukan. • Berdasarkan konfirmasi, Direksi telah menyosialisasikan RKAP kepada seluruh karyawan Perusahaan. **Kelemahan** -				
	91	Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan.	**Kekuatan** • Sarinah telah memiliki kebijakan/pedoman mengenai sistem dan prosedur mutasi dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Sistem dan Prosedur PT Sarinah (Persero) yang antara lain mengatur Prosedur Standar Perencanaan Penempatan/Mutasi Karyawan dalam Sistem dan Prosedur Sumber Daya Manusia. • Berdasarkan konfirmasi, Direksi	**Hambatan** - **Rekomendasi** • Direksi agar memastikan penyelesaian penyusunan *database* karyawan.	1,088	92,50%	1,006

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			telah melakukan penempatan karyawan pada level-level dalam organisasi perusahaan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi struktur organisasi. • Penempatan karyawan tersebut dilakukan sesuai dengan spesifikasi dengan memperhatikan tingkat obyektivitas dan transparansi. • Pada 2014, Direksi telah melaksanakan seleksi untuk promosi pejabat satu level di bawah Direksi sesuai dengan ketentuan melalui proses *assessment* dan menghasilkan Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 037/KPTS/DIREKSI/VIII/2014 Tentang Mutasi dan Promosi Karyawan di Lingkungan PT Sarinah (Persero) tanggal 29 Agustus 2014 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi telah				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			dibahas secara intens dalam rapat Direksi, baik rapat internal Direksi serta rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, yang telah dimuat dalam risalah rapat. **Kelemahan** • Berdasarkan konfirmasi, saat ini Sarinah sedang mengembangkan *database* tentang orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi, serta pengalaman yang cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditargetkan pada setiap posisi/jabatan-jabatan di Perusahaan.				
	92	Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi	**Kekuatan** • Direksi memiliki kebijakan dan mekanisme untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/anggota Direksi/Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar, Keputusan	**Hambatan** - **Rekomendasi** • Direksi agar mengupayakan pencapaian target Perusahaan.	0,778	95,00%	0,739

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.	Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 38.1/KPTS/DIREKSI/IX/2014 tanggal 5 September 2014 perihal Sistem dan Prosedur Atas Proses Bisnis PT Sarinah (Persero) yang Berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul yang antara lain mengatur Mekanisme Komunikasi, Penghargaan dan Keputusan Penting, serta Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Korporat PT Sarinah (Persero). • Berdasarkan kebijakan tersebut, Direksi telah mengidentifikasi, membahas, serta mengambil keputusan secara intensif atas usulan peluang bisnis yang antara lain ditunjukkan dalam risalah rapat Direksi. • Direksi telah menyampaikan usulan peluang bisnis kepada Dewan Komisaris disertai dengan studi kelayakan melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			melalui Surat Direksi. • Peluang bisnis yang dibahas dan disampaikan kepada Dewan Komisaris merupakan peluang yang belum terlambat untuk ditindaklanjuti. **Kelemahan** • Pencapaian target RKAP yang ditunjukkan dalam Laporan Manajemen Tahun 2014 (*Audited*) sebesar 75,43%.				
	93	Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan	**Kekuatan** • Direksi memiliki mekanisme untuk sewaktu-waktu segera membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual.* • Direksi telah melakukan pembahasan mengenai isu-isu	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,622	100,00%	0,622

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak pada usaha dan kinerja perusahaan melalui rapat Direksi. • Direksi juga menyampaikan isu-isu tersebut kepada Dewan Komisaris untuk meminta arahan dalam merespon isu tersebut melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. • Berdasarkan konfirmasi, tidak terdapat perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak signifikan pada usaha dan kinerja Perusahaan yang tidak direspon oleh Direksi. **<u>Kelemahan</u>** -				
28	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.				8,089	93,84%	7,591

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	94	Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan setelah melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.	**Kekuatan** • Berdasarkan telaah pada risalah rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta Surat Direksi, diketahui bahwa setiap pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris telah melalui mekanisme yang sesuai dengan Anggaran Dasar atau sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. • Program/kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang dalam jumlah signifikan telah diputuskan melalui analisis yang memadai berdasarkan informasi yang cukup, studi/kajian kelayakan, serta analisis risiko yang antara lain ditunjukkan melalui Surat Direksi, Internal Memo Kajian Risiko, dan risalah rapat Direksi. • Proses pengambilan keputusan atau kebijakan Direksi telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,467	100,00%	0,467

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			pedoman/mekanisme tentang pengambilan keputusan. **Kelemahan** -				
	95	Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.	**Kekuatan** • Direksi telah menetapkan sistem penilaian kinerja Perusahaan dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 38.1/KPTS/DIREKSI/IX/2014 tanggal 5 September 2014 perihal Sistem dan Prosedur Atas Proses Bisnis PT Sarinah (Persero) yang Berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul dan berdasarkan Surat Kementerian BUMN Nomor: S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 mengenai Pedoman Ketentuan *Key Performance Indicator* (KPI) Pada BUMN dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU).	**Hambatan** • Kebijakan efisiensi Perusahaan. **Rekomendasi** • Direksi agar mengupayakan pengembangan aplikasi komputer untuk pengukuran kinerja.	0,311	83,33%	0,259

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			• Indikator kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi telah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan peran unit serta jabatan (struktural) dalam organisasi yang antara lain ditunjukkan dalam KPI individu. **Kelemahan** • Berdasarkan konfirmasi, sistem pengukuran kinerja belum didukung dengan aplikasi komputer.				
	96	Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.	**Kekuatan** • Sarinah telah memiliki target kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan kapasitas peran dan potensi tugas unit dan jabatan (struktural) di dalam organisasi yang dimuat dalam KPI individu. • KPI tersebut menjadi kontrak kinerja setiap individu dan ditandatangani oleh Kepala Divisi dan Direksi.	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,155	100,00%	0,155

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan -				
	97	Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan.	**Kekuatan** • Direksi telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi yang antara lain ditunjukkan melalui tersedianya Laporan Manajemen Triwulanan secara tepat waktu, serta risalah rapat Direksi. • Berdasarkan risalah rapat Direksi, dapat diketahui analisis dan evaluasi dalam menindaklanjuti kinerja unit-unit di bawah Direksi. **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,311	100,00%	0,311
	98	Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris/Dewan	**Kekuatan** • Direksi menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk laporan pencapaian kinerja	**Hambatan** • Pemegang Saham belum memiliki kebijakan khusus terkait dengan penilaian kinerja individu anggota	0,311	75,00%	0,233

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		Pengawas.	perusahaan berdasarkan target-target kolegial Direksi antara lain melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta melalui Surat Direksi. • Adapun tingkat pencapaian target kinerja Direksi secara kolektif berdasarkan Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Atas Pengukuran Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) PT Sarinah (Persero) Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 Nomor: LAK/AUO/15014 tanggal 27 Februari 2015 oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi adalah 100,03 atau Kategori A1. **Kelemahan** • Direksi **belum** melaporkan tingkat pencapaian kinerja individu anggota Direksi kepada Dewan Komisaris.	Direksi. **Rekomendasi** • Direksi agar mengembangkan KPI individu anggota Direksi berdasarkan KPI Korporat.			

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	99	Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi	**Kekuatan** • Direksi melalui Dewan Komisaris telah menyampaikan usulan kepada RUPS/Pemegang Saham tentang insentif kinerja Direksi tahun 2014, sesuai ketentuan yang berlaku, yang ditunjukkan melalui Surat Dewan Komisaris Nomor: 10/DEKOM/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 perihal Tanggapan Dewan Komisaris Atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2013 PT Sarinah (Persero). • Berdasarkan konfirmasi, penentuan usulan insentif kinerja Direksi mencerminkan kesesuaian dengan kinerja yang dicapai (KPI). **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,156	100,00%	0,156

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	100	Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	**Kekuatan** • Sarinah telah memiliki *Blueprint* IT yang memuat pedoman seluruh aplikasi di Perusahaan yang telah didesain sampai dengan level data dan sistem keamanannya. • Sarinah juga telah memiliki SOP Biro Teknologi dan Informasi yang memuat pedoman Permintaan Aplikasi Baru, *Maintenance Hardware*, Pengadaan *Software* Baru, Pengadaan *Hardware* dan Jaringan Baru, serta Perubahan Modul. • Pelaksanaan sistem IT telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui Laporan Manajemen Triwulanan. **Kelemahan** • Perusahaan **belum** menyusun *Information Technology Master Plan* (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi.	**Hambatan** • Belum adanya persamaan persepsi tentang kebutuhan penyusunan ITMP dan audit atas IT. **Rekomendasi** • Direksi agar menyusun *Information Technology Master Plan* (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi. • Direksi agar memastikan dilakukannya audit atas IT di Perusahaan.	0,778	62,50%	0,486

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			• Pada tahun 2014, **belum** dilakukan audit atas IT.				
	101	Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.	**Kekuatan** **Standar Pelayanan Minimal** • Sarinah telah memiliki kebijakan dan SOP mengenai layanan pelanggan dan standar pelayanan minimal yang antara lain diatur dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Sistem dan Prosedur PT Sarinah (Persero) yang memuat Petunjuk Kerja Petugas *Counter* dan Prosedur Standar *Call Center*, serta Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 38.1/KPTS/DIREKSI/IX/2014 tanggal 5 September 2014 perihal Sistem dan Prosedur Atas Proses Bisnis PT Sarinah (Persero) yang Berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul yang memuat Prosedur Pengelolaan Suara dan *Engagement* Pelanggan,	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,778	96,67%	0,752

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Prosedur Survei Kepuasan/Ketidakpuasan Pelanggan, Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan, Prosedur Pelayanan Terhadap Pemilik *Counter* dan Pengunjung. • Berdasarkan konfirmasi, SOP tersebut telah diinformasikan kepada seluruh karyawan. • Berdasarkan Laporan Akuntan Independen tentang Penerapan Prosedur yang Disepakati Atas Pengukuran Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) PT Sarinah (Persero) Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 Nomor: LAK/AUO/15014 tanggal 27 Februari 2015 oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi, pencapaian KPI untuk indikator Fokus Pada Pelanggan dan Pasar mencapai 164,10 yang terdiri dari Tingkat Kepuasan Pelanggan Outlet Thamrin mencapai 85,20 dari target 87,00,				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Pertumbuhan Pelanggan Melalui Point *Reward* di OT Thamrin mencapai 9,02 dari target 5,00, Pertumbuhan Rata-rata Nilai Per Transaksi OT Thamrin mencapai 6,49 dari target 5,00, serta Penurunan *Complaint* Pelanggan mencapai 11,11 dari target 5,00. **Sistem Mutu** • Sarinah telah memiliki kebijakan dan SOP mengenai peningkatan mutu yang antara lain diatur dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Sistem dan Prosedur PT Sarinah (Persero) yang memuat Prosedur Standar Pengecekan Kualitas Barang, Prosedur Standar *Broken Stock*, Prosedur Standar Perbaikan Utilitas dan Fasilitas. Prosedur Standar Pemeliharaan Utilitas dan Fasilitas.				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			• Sarinah menerapkan pengendalian mutu secara konsisten serta melakukan evaluasi dan audit secara berkala yang antara lain ditunjukkan melalui Laporan Audit SPI Tahun 2014. • Berdasarkan laporan tersebut, perusahaan menindaklanjuti ketidaksesuaian mutu. • Berdasarkan konfirmasi, Sarinah memberikan kompensasi dalam hal SPM dan mutu tidak terpenuhi. **Kelemahan** • Sertifikasi atas kebijakan mutu Perusahaan masih berupa evaluasi implementasi KPKU.				
	102	Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun kualitas barang	**Kekuatan** • Sarinah telah memiliki pedoman mengenai pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,933	100,00%	0,933

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		dan jasa tersebut.	30 Juni 2010 Tentang Sistem dan Prosedur PT Sarinah (Persero) yang antara lain memuat Prosedur Standar Pengadaan Inventaris dan Prosedur Standar Pengadaan ATK, serta Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 005/KPTS/DIREKSI/III/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Non Niaga PT Sarinah (Persero). • Berdasarkan pedoman tersebut, Sarinah merencanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan perusahaan yang dimuat dalam Revisi RKAP Tahun 2014 PT Sarinah (Persero). • Berdasarkan Laporan Audit SPI Tahun 2014 serta Hasil Survei Kepuasan Supplier Sarinah Bulan Januari 2015, diketahui bahwa Sarinah telah melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat. • Sarinah telah memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS). • Sarinah melalui SPI memastikan bahwa SOP pengadaan barang dan jasa perusahaan tersebut telah dijalankan dengan benar yang ditandai dengan tidak terdapat temuan-temuan audit mengenai pengadaan yang merugikan perusahaan pada tahun 2014, serta tidak terdapat sanggahan pemilihan penyedia barang/jasa perusahaan. **Kelemahan** -				
	103	Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan	**Kekuatan** **Pendidikan dan Pelatihan** • Sarinah memiliki kebijakan/program pendidikan dan pelatihan karyawan	**Hambatan** - **Rekomendasi**	3,267	98,44%	3,216

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan.	yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Sistem dan Prosedur PT Sarinah (Persero) yang antara lain memuat Prosedur Standar Pengembangan Kompetensi dalam Sistem dan Prosedur Sumber Daya Manusia. • Berdasarkan kebijakan tersebut, Sarinah melaksanakan pelatihan karyawan sebanyak 18 kali pada tahun 2014, lebih banyak dari yang ditargetkan sebesar 10 kali yang dimuat dalam Laporan Akuntan Independen tentang Penerapan Prosedur yang Disepakati Atas Pengukuran Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) PT Sarinah (Persero) Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 Nomor: LAK/AUO/15014 tanggal 27 Februari 2015 oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi.	• Direksi agar melakukan evaluasi efektivitas pendidikan dan pelatihan karyawan.			

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			• Terhadap setiap pendidikan dan pelatihan yang diikuti karyawan dilaporkan dalam Laporan Hasil Pelatihan Karyawan. • Adapun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan karyawan dilaksanakan secara adil. **Pengembangan SDM** • Sarinah telah mengikutsertakan karyawan dalam program *training, coaching,* dan *assignment* selama tahun 2014. • Program-program tersebut dilaksanakan sesuai pedoman dan target yang ditetapkan. **Program K3** • Sarinah telah memiliki kebijakan K3 yang antara lain diatur dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 38.1/KPTS/DIREKSI/IX/2014 tanggal 5 September 2014 perihal Sistem				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			dan Prosedur Atas Proses Bisnis PT SARINAH (Persero) yang Berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul yang memuat Penanganan Keadaan Darurat, Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 027/KPTS/DIREKSI/I/VIII/2008 Tentang Struktur Organisasi Manajemen Sistem Tanggap Darurat Pada Gedung PT Sarinah (Persero) di Jalan Thamrin Jakarta, serta Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 010/KPTS/DIREKSI/I/II/2006 Tentang Ketentuan Pemberian Bantuan Biaya Pengobatan, Rawat Inap, Bersalin, Perawatan Mata dan Gigi Karyawan PT Sarinah (Persero). • Sarinah memiliki alat keselamatan kerja, fasilitas kesehatan di lingkungan kerja, serta asuransi kesehatan terhadap pekerja dan keluarga.				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			• Sarinah senantiasa melakukan evaluasi terkait K3 yang dilaporkan dalam Identifikasi dan Analisa Potensi Bahaya di Tempat Kerja dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. **Sistem Penilaian Kinerja** • Sarinah memiliki kebijakan sistem penilaian kinerja individu dan kompetensi karyawan berdasarkan Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 38.1/KPTS/DIREKSI/IX/2014 tanggal 5 September 2014 perihal Sistem dan Prosedur Atas Proses Bisnis PT SARINAH (Persero) yang Berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul serta berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 mengenai Pedoman Ketentuan *Key Performance Indicator* (KPI) Pada BUMN dan Kriteria Penilaian				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kinerja Unggul. • Sarinah memiliki indikator kinerja individu yang dimuat dalam Uraian Jabatan PT Sarinah (Persero) dan target yang ditetapkan oleh atasan dalam KPI individu. • Penilaian kinerja karyawan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan hasilnya dimanfaatkan untuk pengembangan karyawan. **Kesempatan yang Memadai Untuk Menduduki Posisi Tertentu Sesuai Kompetensi** Berdasarkan konfirmasi, Sarinah telah memberikan kesempatan yang memadai kepada setiap karyawan untuk menduduki posisi tertentu yang sesuai dengan kompetensi. **Perusahaan Menerapkan Remunerasi dan Kesejahteraan** • Sarinah memiliki kebijakan terkait remunerasi dan kesejahteraan				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			karyawan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Utama Nomor: 180/DIREKSI/SE/II/2006 tanggal 22 Februari 2006 tentang Prosedur dan Tertib Administrasi Karyawan, Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 021/KPTS/DIREKSI/VI/2014 tentang Perubahan Skala Gaji Pokok Dalam Sistem Imbalan Karyawan PT Sarinah (Persero), Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 041/KPTS/DIREKSI/VII/2014 tentang Penyesuaian Gaji Karyawan PT Sarinah (Persero) Berdasarkan Peningkatan Gaji Pokok, Peningkatan Tunjangan Kehadiran dan Tunjangan Prestasi Penilaian Kinerja Tahun 2014. • Kebijakan tersebut telah ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala. • Kebijakan tersebut telah disosialisasikan untuk dipahami oleh seluruh karyawan.				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			• Berdasarkan kebijakan tersebut, perusahaan menetapkan remunerasi karyawan dengan memperhatikan tingkat keadilan. **Perusahaan Menerapkan *Reward and Punishment* Atas Penerapan Pedoman Perilaku dan Disiplin** • Sarinah memiliki kebijakan *reward and punishment* yang antara lain diatur dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 013/KPTS/DIREKSI/I/II/2006 tentang Ketentuan Pelanggaran dan Sanksi Bagi Karyawan PT Sarinah (Persero). Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 041/KPTS/DIREKSI/VII/2015 Tentang Penyesuaian Gaji Karyawan PT Sarinah (Persero) Berdasarkan Peningkatan Gaji Pokok, Peningkatan Tunjangan Kehadiran dan Tunjangan Prestasi Penilaian Kinerja Tahun 2014.				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			• Kebijakan tersebut telah disosialisasikan untuk dipahami oleh seluruh karyawan. • Sarinah memiliki program *reward* untuk pengabdian karyawan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun yang antara lain ditunjukkan melalui Internal Memo Direktur Utama Nomor: 134/DSDM/IM/IV/2014 tanggal 16 April 2014 perihal Penambahan Karyawan Penerima Cincin Penghargaan PT Sarinah (Persero). **Keterbukaan Informasi Mengenai Perencanaan Perusahaan ke Depan yang Dapat Berakibat/Berpengaruh Pada Pekerja** • Sarinah memiliki kebijakan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan perencanaan perusahaan yang dapat berpengaruh signifikan bagi karyawan.				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			• Sarinah memiliki media komunikasi atau sistem informasi bagi karyawan, antara lain melalui intranet, *website*, majalah internal, LCD TV. • Sarinah telah melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi tersebut secara konsisten. **Kelemahan** • Perusahaan belum sepenuhnya melakukan evaluasi efektivitas pendidikan dan pelatihan karyawan.				
	104	Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (*subsidiary governance*) dan/atau perusahaan patungan.	**Kekuatan** • Direksi telah menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (*subsidiary governance*) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 Pedoman Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Anak BUMN. • Berdasarkan kebijakan tersebut, Direksi melakukan pengangkatan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,622	100,00%	0,622

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Dewan Komisaris dan Direksi anak perusahaan yang antara lain ditunjukkan melalui Surat Direksi Nomor: 206/DIREKSI/II/2015 tanggal 24 Februari 2014 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan *Fit and Proper Test* Calon Direksi dan Dewan Komisaris PT Sari Valuta Asing, serta Surat Dewan Komisaris Nomor: 2/DEKOM/II/2015 tanggal 18 Februari 2015. • Direksi telah menyetujui penetapan target kinerja dan realisasi kinerja anak perusahaan mendukung kinerja perusahaan. • Berdasarkan konfirmasi, penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk anak perusahaan telah ditetapkan dengan memperhatikan pencapaian kinerja. **Kelemahan** -				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
29	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.				3,266	100,00%	3,266
	105	Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).	**Kekuatan** • Direksi telah menetapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 Perihal Sistem dan Prosedur PT Sarinah (Persero) yang antara lain memuat Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Keuangan. • Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan telah diterapkan secara konsisten yang ditunjukkan dengan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sarinah (Persero)	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,622	100,00%	0,622

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			dan Entitas Anak Tahun 2014 oleh auditor independen. • Sarinah telah menyusun Laporan Keuangan Triwulanan dalam Laporan Manajemen Triwulanan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan diterbitkan tepat waktu. **Kelemahan** -				
	106	Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan	**Kekuatan** • Sarinah telah memiliki kebijakan terkait dengan manajemen risiko yang diatur dalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Korporat PT Sarinah (Persero) yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2013. • Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan perusahaan. • Sarinah telah memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	1,244	100,00%	1,244

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			manajemen risiko, yaitu Divisi Legal dan Manajemen Risiko. • Sarinah memiliki rencana kerja untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko yang dimuat dalam Revisi RKAP Tahun 2014 PT Sarinah (Persero). • Sarinah telah melaksanakan program manajemen risiko yang antara lain ditunjukkan dalam Profil Risiko Divisi Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2014, Internal Memo Kajian Risiko, dan Laporan Manajemen Triwulanan. • Direksi telah melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko melalui rapat Direksi. • Tingkat kesungguhan kepedulian Direksi terhadap risiko (*risk awareness*) ditunjukkan melalui pemantauan dan pelaksanaan tindakan mitigasi yang dilaporkan dalam Rangkuman Penerapan				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Manajemen Risiko PT Sarinah (Persero) Tahun 2014 – Saat Ini. • Direksi telah melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Surat Direksi, serta telah disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Surat Direksi terkait hal-hal yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. **Kelemahan** -				
	107	Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi dan mengamankan investasi dan aset perusahaan.	**Kekuatan** • Direksi telah menetapkan rancangan sistem pengendalian intern yang mengatur kerangka (*framework*) pengendalian intern. • Direksi telah memberikan sertifikasi (asersi) terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sarinah (Persero)	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,778	100,00%	0,778

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			dan Entitas Anak Tahun 2014. • Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan *cascading* dari unit-unit dan cabang-cabang yang dimiliki perusahaan. • Sarinah telah melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas yang dilaporkan dalam Laporan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern Pada PT Sarinah (Persero) Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014, serta pada tingkat operasional/aktivitas yang dilaporkan dalam Laporan Audit SPI Tahun 2014. • Sarinah telah menerbitkan *internal control report* dalam Laporan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern Pada PT Sarinah (Persero) Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014.				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan -				
	108	Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).	**Kekuatan** • Direksi telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK) yang ditunjukkan melalui risalah rapat Direksi, Internal Memo, Matriks Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Pengelolaan Aset PT Sarinah (Persero) Tahun Buku 2008-2009, serta Tindak Lanjut PT Sarinah (Persero) Atas Rekomendasi BPK RI Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengadaan dan Penjualan Singkong Kering (Cassava) Tahun 2011 dan 2012 (s.d Semester I) Pada PT Sarinah (Persero) s.d Tanggal 23 Juli 2014.	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,622	100,00%	0,622

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			• Direksi telah melaporkan pelaksanaan tindak lanjut temuan audit tersebut kepada Dewan Komisaris melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta melalui Surat Direksi. • Berdasarkan laporan tindak lanjut, diketahui bahwa perusahaan menindaklanjuti sepenuhnya temuan audit dengan tingkat komitmen yang tinggi oleh Direksi dalam menindaklanjuti temuan audit. **Kelemahan** -				
30	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.				0,778	100,00%	0,778
	109	Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan	**Kekuatan** • Sarinah memiliki Divisi Legal dan Manajemen Risiko yang berfungsi	**Hambatan** -	0,156	100,00%	0,156

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.	mengendalikan dan memastikan kebijakan, keputusan perusahaan, dan seluruh kegiatan Perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga. • Direksi telah memastikan fungsi kepatuhan di perusahaan telah mengikuti perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan akan berlaku bagi perusahaan. **Kelemahan** -	**Rekomendasi** -			
	110	Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.	**Kekuatan** • Sarinah telah melaksanakan kajian hukum (*legal opinion*) atas setiap rencana tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,622	100,00%	0,622

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			kesesuaian hukum atau ketentuan yang berlaku yang antara lain ditunjukkan dalam risalah rapat Direksi serta Surat Direksi tentang hal-hal yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. • Perusahaan juga melakukan evaluasi kajian risiko dan legal atas inisiatif bisnis yang ditunjukkan dalam risalah rapat Direksi, serta risalah rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. • Sarinah telah mengupayakan penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi yang tengah dihadapi, antara lain terkait *outlet* Pancoran, SHI, dan kasus Situmorang. • Sarinah memiliki tingkat kepatuhan yang baik terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga yang ditunjukkan dengan tidak adanya teguran, tuntutan maupun sanksi				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			kepada perusahaan, opini auditor tidak menunjukkan adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang signifikan, nota kesepahaman dan perjanjian dengan pihak ketiga menggunakan Bahasa Indonesia, diselesaikannya setiap permasalahan terkait transaksi bisnis dengan pihak lain, serta Perusahaan tidak sedang menjadi pembicaraan publik terkait masalah tertentu. **Kelemahan** -				
31	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan *stakeholders*.				6,689	97,96%	6,553
	111	Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.	**Kekuatan** • Sarinah telah memiliki kebijakan hak-hak konsumen/pelanggan, kebijakan keamanan, keselamatan	**Hambatan** -	1,244	100,00%	1,244

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			dan kesehatan konsumen/pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimuat dalam Pedoman Perilaku, Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Sistem dan Prosedur PT Sarinah (Persero) yang memuat Petunjuk Kerja Petugas *Counter* dan Prosedur Standar *Call Center*, serta Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 38.1/KPTS/DIREKSI/IX/2014 tanggal 5 September 2014 perihal Sistem dan Prosedur Atas Proses Bisnis PT Sarinah (Persero) yang Berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul yang memuat Prosedur Pengelolaan Suara dan *Engagement* Pelanggan, Prosedur Survei Kepuasan/Ketidakpuasan Pelanggan, Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan, Prosedur Pelayanan	**<u>Rekomendasi</u>** -			

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Terhadap Pemilik *Counter* dan Pengunjung. • Sarinah telah memiliki saluran untuk menampung keluhan pelanggan melalui alamat *e-mail:* customer_care@sarinah.co.id, layanan telepon (62-21) 31923008 dan fax : (62-21) 3140250, serta melalui *customer service* pada setiap *outlet*. • Sarinah melakukan komunikasi informasi produk dan layanan melaui *website* perusahaan, LCD TV di perusahaan, serta *customer gathering*. • Sarinah melakukan penanganan keluhan pelanggan berdasarkan pedoman terkait pelanggan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 38.1/KPTS/DIREKSI/IX/2014 tanggal 5 September 2014 perihal Sistem dan Prosedur Atas Proses Bisnis PT				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			SARINAH (Persero) yang Berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul. • Berdasarkan kebijakan tersebut, perusahaan meneruskan keluhan pelanggan kepada pihak terkait dalam perusahaan dan mencari penyebab permasalahan, serta mengimplementasikan tindakan untuk mengatasi penyebab permasalahan dari keluhan pelanggan. • Pada tahun 2014, Sarinah telah melakukan survei kepuasan pelanggan *outlet* Thamrin dan telah disampaikan ke Direktur Operasional pada 29 Desember 2014. • Adapun rekomendasi hasil survei ditindaklanjuti/ditangani perusahaan. **<u>Kelemahan</u>** -				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	112	Pelaksanaan hubungan dengan pemasok.	**Kekuatan** • Sarinah telah melaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan pedoman yang dimiliki, secara terbuka dan adil. • Sarinah telah melakukan asesmen pemasok pada tahun 2014 berdasarkan pencapaian QCDS (*quality, cost, delivery, service*). • Sarinah mengupayakan pembayaran secara tepat waktu kepada pemasok. • Sarinah juga telah melakukan pengukuran kepuasan pemasok yang telah dilaporkan dalam Hasil Survei Kepuasan *Supplier* Sarinah Bulan Januari 2015 dengan hasil survei dalam kategori "GOOD". **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,933	100,00%	0,933

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	113	Pelaksanaan hubungan dengan kreditur	**Kekuatan** • Berdasarkan konfirmasi, Sarinah telah memenuhi ketentuan terkait kebijakan dengan kreditur yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian, termasuk pemberian informasi. • Sarinah melakukan pembayaran kreditur secara tepat waktu sesuai perjanjian. **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,778	100,00%	0,778
	114	Pelaksanaan kewajiban kepada Negara	**Kekuatan** • Sarinah telah melakukan penyampaian dokumen perpajakan dan pembayaran kewajiban pajak secara tepat waktu yang antara lain ditunjukkan melalui Surat Setor Pajak Tahun 2014. • Sarinah juga telah menyampaikan dokumen kewajiban kepada Negara, khususnya kepada Kementerian BUMN sesuai ketentuan yang	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,467	100,00%	0,467

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			berlaku. **<u>Kelemahan</u>** -				
	115	Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan	**<u>Kekuatan</u>** **Partisipasi Karyawan** • Sarinah memiliki kebijakan yang mendorong partisipasi karyawan yang dimuat dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Sarinah (Persero) Periode 2012-2013. • Sarinah menyediakan sarana partisipasi karyawan dalam bentuk Serikat Pekerja, *gathering* karyawan, ataupun lainnya. **Pengukuran Kepuasan Karyawan** • Sarinah memiliki metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan berdasarkan Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Sistem dan	**<u>Hambatan</u>** • Belum terdapat persamaan persepsi tentang perlunya melakukan survei kepuasan karyawan secara berkala. **<u>Rekomendasi</u>** • Direksi agar melakukan survei kepuasan karyawan secara berkala.	1,089	87,50%	0,953

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Prosedur PT Sarinah (Persero) yang antara lain memuat Sistem dan Prosedur *Riset and Continuous Improvement.* • Sarinah juga senantiasa melakukan program untuk meningkatkan kepuasan karyawan antara lain melalui pembaharuan tingkat remunerasi. **Kelemahan** • Perusahaan **belum** melakukan pengukuran tingkat kepuasan karyawan di tahun 2014.				
	116	Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan *stakeholders*	**Kekuatan** • Sarinah telah memiliki mekanisme penanganan keluhan *stakeholders* yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Sistem dan Prosedur PT Sarinah (Persero), serta Keputusan Direksi PT Sarinah	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,311	100,00%	0,311

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			(Persero) Nomor: 38.1/KPTS/DIREKSI/IX/2014 tanggal 5 September 2014 perihal Sistem dan Prosedur Atas Proses Bisnis PT Sarinah (Persero) yang Berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul • Berdasarkan Laporan Tahunan 2014 PT Sarinah (Persero), tidak terdapat laporan keluhan *stakeholders* yang masuk pada tahun terkait. **Kelemahan** -				
	117	Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.	**Kekuatan** • Sarinah berusaha memenuhi harapan Pemegang Saham melalui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Manajemen PT Sarinah (Persero) Tahun 2014 dengan hasil pencapaian KPI sebesar 100,03 atau masuk dalam kategori "A1" yang dilapporkan dalam Laporan Akuntan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,311	100,00%	0,311

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Independen Atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Atas Pengukuran Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) PT Sarinah (Persero) Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 Nomor: LAK/AUO/15014 tanggal 27 Februari 2015 oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi. **Kelemahan** -				
	118	Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan.	**Kekuatan** • Perusahaan memiliki kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Sistem dan Prosedur PT Sarinah (Persero) yang antara lain memuat Sistem dan Prosedur PKBL.	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	1,556	100,00%	1,556

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			• Perusahaan memiliki unit/bagian yang bertugas melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang berada di bawah *Corporate Secretary dan General Affair.* • Perusahaan juga memiliki indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan PKBL yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT Sarinah (Persero) Tahun 2014 (Revisi). • Perusahaan memiliki rencana kerja untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan dalam Rencana Kerja Dan Anggaran Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT Sarinah (Persero) Tahun 2014 (Revisi). • Kegiatan tanggung jawab sosial dilaksanakan berdasarkan rencana yang ditetapkan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Program				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Sarinah (Persero) 2014. • Sarinah memiliki SOP yang memuat kewajiban perusahaan memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha, serta fasilitas perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja yang antara lain diatur dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Sistem dan Prosedur PT Sarinah (Persero) yang antara lain memuat Sistem dan Prosedur Buka dan Tutup Toko. • Sarinah memiliki program penanganan keadaan darurat yang antara lain diatur dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 38.1/KPTS/DIREKSI/IX/2014 tanggal 5 September 2014 perihal Sistem				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			dan Prosedur Atas Proses Bisnis PT SARINAH (Persero) yang Berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul yang antara lain memuat tentang Penanganan Keadaan Darurat. • Untuk keperluan tersebut, Sarinah telah memiliki infrastruktur, baik sebagai *early warning system* maupun pelaksanaan program keadaan darurat. **Kelemahan** -				
32	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.				1,089	92,86%	1,011
	119	Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan	**Kekuatan** • Sarinah telah memiliki panduan penanganan benturan kepentingan di lingkungan perusahaan yang diatur dalam Anggaran Dasar, *Board Manual*, Pedoman GCG.	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,467	100,00%	0,467

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.	• Kebijakan tersebut telah disosialisasikan untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi Direksi dan pejabat struktural. • Direksi telah menandatangani Pakta Integritas pada tahun 2014 sebagai pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan. **Kelemahan** -				
	120	Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.	**Kekuatan** • Direksi menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan dalam usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. • Pada tahun 2014, tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional oleh Direksi yang mengandung benturan kepentingan.	**Hambatan** • Belum terdapat persamaan persepsi tentang perlunya pengungkapan Daftar Khusus. **Rekomendasi** • Direksi agar membuat surat pernyataan mengenai pengungkapan kepemilikan saham pada perusahaan lain untuk dicatat dalam daftar	0,622	87,50%	0,544

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan • Penyampaian laporan kepemilikan saham Direksi pada perusahaan dan perusahaan lainnya baru dilaksanakan pada tahun 2015 berdasarkan Daftar Khusus Kepemilikan Saham Direksi PT Sarinah (Persero).	khusus.			
33	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.				1,089	100,00%	1,089
	121	Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	**Kekuatan** • Direksi telah menyusun Laporan Manajemen Triwulanan selama tahun 2014. • Laporan yang telah ditandatangani seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,622	100,00%	0,622

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham sesuai batas waktu penyampaian melalui Surat Direksi dan Surat Dewan Komisaris tentang tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulanan. • Adapun muatan dari Laporan Manajemen Triwulanan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **Kelemahan** -				
	122	Direksi memberikan perlakukan yang sama (*fairness*) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	**Kekuatan** • Sarinah senantiasa memberikan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, baik melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, ataupun penyampaian dokumen terkait. • Sarinah senantiasa memberikan perlakuan yang sama dalam pemberian informasi kepada Dewan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,467	100,00%	0,467

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Komisaris dan Pemegang Saham. **Kelemahan** -				
34	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.				1,556	93,11%	1,449
	123	Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulandan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	**Kekuatan** • Sarinah telah memiliki pedoman/tata tertib rapat Direksi yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual.* **Kelemahan** • Pedoman tata tertib rapat Direksi belum sepenuhnya memuat tata penyusunan risalah rapat, pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak	**Hambatan** • Belum terdapat pemutakhiran *Board Manual*. **Rekomendasi** • Direksi agar melakukan pembaharuan *Board Manual,* khususnya pada bagian tata tertib rapat Direksi dengan menambahkan tata penyusunan risalah rapat, pelaksanaan evaluasi tindak	0,156	31,25%	0,049

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dengan usulan Direksi.	lanjut hasil rapat sebelumnya, pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dengan usulan Direksi.			
	124	Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan.	**Kekuatan** • Berdasarkan ketentuan dalam *Board Manual*, rapat Direksi diadakan minimal sebulan sekali atau bila dianggap perlu. • Berdasarkan ketentuan tersebut, selama tahun 2014, Direksi telah mengadakan rapat internal Direksi sebanyak 31 kali yang dilaporkan dalam Laporan Tahunan 2014 PT Sarinah (Persero). **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,467	100,00%	0,467

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	125	Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi dan Komisaris, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.	**Kekuatan** • Berdasarkan Laporan Tahunan 2014 PT Sarinah (Persero), tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat internal Direksi serta rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi mencapai 100%. **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,311	100,00%	0,311
	126	Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.	**Kekuatan** • Direksi telah melakukan evaluasi hasil rapat sebelumnya pada setiap rapat Direksi yang dimuat dalam risalah rapat Direksi. **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,311	100,00%	0,311
	127	Direksi menindaklanjuti arahan,dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan	**Kekuatan** • Direksi telah melakukan tindak lanjut sesuai arahan ataupun keputusan Dewan Komisaris yang antara lain	**Hambatan** -	0,311	100,00%	0,311

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		Pengawas.	ditunjukkan melalui risalah rapat Direksi. **Kelemahan** -	**Rekomendasi** -			
35	Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.				1,711	93,48%	1,599
	128	Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi.	**Kekuatan** • Sarinah telah memiliki *Internal Audit Charter* PT Sarinah (Persero) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama pada tanggal 31 Juli 2009. • Adapun muatan *Internal Audit Charter* disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern, serta menjelaskan posisi fungsi Audit Intern dalam organisasi, kewenangan Fungsi Audit Intern untuk mendapatkan akses terhadap	**Hambatan** - **Rekomendasi** • Satuan Pengawas Intern agar memutakhirkan *Internal Audit Charter.*	0,156	66,67%	0,104

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			semua catatan, personil dan aset perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. dan menjelaskan ruang lingkup Fungsi Audit Internal. **Kelemahan** • Sejak dibuat pada tahun 2009, *Internal Audit Charter* belum pernah dimutakhirkan sehingga belum mengikuti metode audit berbasis risiko, tugas dan tanggung jawab belum meliputi penilaian terhadap *internal control* perusahaan.				
	129	SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya	**Kekuatan** • Berdasarkan struktur organisasi perusahaan, posisi Satuan Pengawas Intern berada langsung di bawah Direktur Utama dan diangkat dengan persetujuan Dewan Komisaris. • Kepala Divisi Satuan Pengawas Intern mempunyai akses langsung melapor hasil kerjanya kepada	**Hambatan** • Waktu yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi profesi CIA/QIA cukup panjang, sedangkan tingkat rotasi karyawan di Perusahaan cukup cepat.	0,466	95,00%	0,443

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Dewan Komisaris dan/atau melalui Komite Audit. • Jumlah personil Satuan Pengawas Intern saat ini sebanyak 8 orang dan dinilai telah sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya. • Staff Satuan Pengawas Intern memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan, serta mengikuti program pengembangan profesi secara berkelanjutan. • Satuan Pengawas Intern memiliki *Internal Audit Charter* PT Sarinah (Persero) yang memuat pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan intern, serta melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi. **Kelemahan** • Belum ada anggota Satuan Pengawas Intern yang memperoleh sertifikasi profesi CIA/QIA.	**Rekomendasi** • Direksi agar mengupayakan anggota Satuan Pengawas Intern memperoleh sertifikasi profesi CIA/QIA.			

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	130	SPI melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.	**Kekuatan** • Satuan Pengawas Intern telah menyusun PKPT dalam *Action Plan* Tahun 2014 Divisi Satuan Pengawasan Intern yang disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Surat Komite Audit dan telah disetujui oleh Direktur Utama. • Berdasarkan PKPT tersebut, Satuan Pengawas Intern melaksanakan audit sesuai dengan *action plan* yang dimiliki dan dilaporkan dalam Laporan Hasil Audit SPI Tahun 2014. • Laporan hasil audit tersebut telah disampaikan kepada Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit. • Berdasarkan temuan audit, Satuan Pengawas Intern memberikan rekomendasi dan ikut berkontribusi dalam peningkatan pengelolaan perusahaan. • Satuan Pengawas Intern mengevaluasi pencapaian sasaran	**Hambatan** - **Rekomendasi** • Satuan Pengawas Intern agar menyusun PKPT dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk based auditing*).	1,089	96,67%	1,053

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			dan tujuan program pengawasan. • Satuan Pengawas Intern juga melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan ekstern yang antara lain dilaporkan dalam Laporan Tindak Lanjut Temuan BPK. • Atas rekomendasi yang disampaikan oleh Satuan Pengawas Intern telah ditindaklanjuti sepenuhnya oleh pihak terkait. **Kelemahan** • PKPT **belum** dilakukan dengan pendekatan risiko (*risk based auditing*).				
36	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.				1,711	98,41%	1,684
	131	Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan	**Kekuatan** • Berdasarkan CV *Corporate Secretary*, diketahui bahwa *Corporate Secretary* memenuhi kualifikasi pendidikan,	**Hambatan** -	0,466	100,00%	0,466

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		pelaksanaan tugasnya	serta memiliki pengalaman profesional dan kompetensi yang memadai. • Berdasarkan struktur organisasi, posisi *Corporate Secretary* berada di bawah Direktur Utama, serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama. • Adapun uraian tugas *Corporate Secretary* sebagaimana tercantum dalam *Board Manual* dan Uraian Jabatan PT Sarinah (Persero) telah mencakup: memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai penghubung (*liaison officer*), dan menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan.	**Rekomendasi** -			

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan -				
	132	Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya.	**Kekuatan** • *Corporate Secretary* telah memberikan informasi yang materiil dan relevan kepada *stakeholders*, antara lain melalui penyampaian Laporan Manajemen Triwulanan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara tepat waktu, memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam *website* perusahaan, mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan untuk "*Press Release*", serta memberikan informasi yang dibutukan mengenai kinerja perusahaan dalam batas yang ditetapkan. • *Corporate Secretary* telah menjalankan tugas sebagai pejabat penghubung yang mengkoordinasikan rapat Direksi,	**Hambatan** - **Rekomendasi** • *Corporate Secretary* agar senantiasa menyusun daftar khusus kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi.	1,089	97,50%	1,062

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, RUPS dan kegiatan lainnya dengan *stakeholders*. • *Corporate Secretary* telah menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian undangan dan risalah RUPS dan rapat Direksi. • *Corporate Secretary* menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat pada 26 Mei 2014 dan anggota Direksi yang baru diangkat pada 28 Agustus 2014. • *Corporate Secretary* menyampaikan pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dalam Laporan Manajemen Triwulan. **Kelemahan** • Pada tahun 2014, *Corporate Secretary* belum menyusun daftar khusus kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi. Daftar Khusus				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah (Persero) baru dibuat pada tahun 2015.				
	133	Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.	**Kekuatan** • Direksi melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas *Corporate Secretay* yang antara lain dilakukan melalui audit oleh Satuan Pengawas Intern dan pengukuran pencapaian KPI *Corporate Secretary*. • Berdasarkan hasil pengukuran KPI *Corporate Secretary* dan laporan pelaksanaan tugas *Corporate Secretary* dalam Laporan Manajemen Triwulanan, diketahui bahwa pelaksanaan tugas *Corporate Secretary* sudah memadai. **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,156	100,00%	0,156

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
37	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.				2,022	100,00%	2,022
	134	Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.	**Kekuatan** • *Corporate Secretary* telah melakukaan koordinasi menyampaikan undangan RUPS melalui surat dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat. • Adapun ketetapan waktu pelaksanaan RUPS telah dilaksanakan secara tepat waktu, antara lain terkait pengesahan RJPP, RKAP, dan Laporan Tahunan. **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	1,089	100,00%	1,089
	135	Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan	**Kekuatan** • Panggilan untuk RUPS, telah mencakup informasi mengenai agenda RUPS.	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,933	100,00%	0,933

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.	• Metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah diputuskan secara khusus dalam RUPS Laporan Tahunan yang dimuat dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Sarinah (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 Nomor: 536/DIREKSI/E/V/2015 atau RIS-54/D2.MBU/05/2015 tanggal 29 Mei 2015. • Terdapat informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh perusahaan dalam Revisi RKAP Tahun 2014 PT Sarinah (Persero). • Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut perusahaan telah dimuat dalam Laporan Tahunan 2014 PT Sarinah				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			(Persero) dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sarinah (Persero) dan Entitas Anak Tahun 2014. • Penjelasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RUPS telah diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung. • Informasi yang diberikan telah memuat penjelasan lengkap dan informasi akurat berkaitan dengan perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan. **<u>Kelemahan</u>** -				
	JUMLAH ASPEK IV				**35,000**	**95,29%**	**33,351**

KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG

PT SARINAH (PERSERO)

ASPEK V:
PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
38	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada *stakeholders*.				0,435	61,11%	0,266
	136	Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.	**Kekuatan** • Sarinah memiliki sejumlah kebijakan tentang pengendalian informasi perusahaan yang tersebar di berbagai SOP. **Kelemahan** • Sarinah **belum** memiliki kebijakan khusus terkait pengendalian informasi perusahaan yang memuat:	**Hambatan** • Belum adanya persamaan persepsi tentang perlunya kebijakan khusus terkait dengan pengendalian informasi. **Rekomendasi** • Direksi sebaiknya membuat kebijakan khusus yang lebih	0,290	41,67%	0,121

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			1. Informasi apa saja yang dikategorikan informasi publik dan informasi rahasia perusahaan; 2. Pihak-pihak yang dapat memberikan dan/atau menyampaikan informasi publik; 3. Prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada *stakeholders*.	spesifik terkait informasi apa saja yang dikategorikan informasi publik dan informasi rahasia perusahaan; pihak-pihak yang dapat memberikan dan/atau menyampaikan informasi publik; prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada *stakeholders*.			
137	137	Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan.	**Kekuatan** • Tigkat kepatuhan Sarinah terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan sudah memadai. **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,145	100,00%	0,145
39	Perusahaan menyediakan bagi *stakeholder* akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan				2,320	97,70%	2,267

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	secara tepat waktu dan berkala.						
	138	Terdapat media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.	**Kekuatan** • Perusahaan memiliki website www.sarinah.co.id yang merupakan media penyediaan informasi publik bagi *stakeholders* PT Sarinah (Persero). • Sarinah memiliki kebijakan terkait pengelolaan dan pemutakhiran *website* dalam Instruksi Direksi berdasarkan Prosedur Standar PT Sarinah (Persero) tentang *Update Data Content Corporate*. Instruksi Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 007/DIREKSI/Ins/II/2012 tanggal 8 Februari 2012 perihal *Tim Updating Website Sarinah Corporate & Website Sarinah Store.* • Pengelolaan *website* www.sarinah.co.id telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan secara konsisten.	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,322	100,00%	0,322

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan -				
	139	*Website* perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan.	**Kekuatan** • Sarinah telah mempublikasikan kebijakan penting terkait dengan implementasi GCG yakni: 1. Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG *Code*), 2. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), 3. Program Pengendalian Gratifikasi Perusahaan. • Selain Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, *website* www.sarinah.co.id telah menyajikan informasi-informasi penting PT Sarinah (Persero) yang terdapat dalam menu sebagai berikut: 1. Profil Perusahaan (Sejarah PT Sarinah (Persero), visi dan misi, manajemen (BOC dan BOD), annual report, GCG, anak	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,572	100,00%	0,572

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			perusahaan); 2. Bisnis (*store*, perdagangan, dan property); 3. Berita; 4. PKBL (*CSR Activities* dan *Development Partners*); 5. Lelang; 6. *Recruitment*; 7. *Link.* Selain itu PT Sarinah (Persero) juga menyediakan informasi mengenai Berita BUMN, *Online News*, dan *Financial*. **Kelemahan** -				
	140	Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan.	**Kekuatan** • Sarinah memiliki majalah internal yang diterbitkan secara berkala setiap bulannya yakni FOKUS (Forum Komunikasi Sarinah), mading yang memuat informasi-informasi, serta intranet Sarinah. • Untuk mengkomunikasikasn kebijakan Sarinah kepada	**Hambatan** - **Rekomendasi** • Direksi agar mensosialisasikan kebijakan perusahaan yang relevan kepada pemasok.	0,427	87,50%	0,374

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			stakeholders lainnya, Sarinah melaksanan pertemuan/*gathering* dengan *stakeholders*, antara lain dengan karyawan, dalam rangka HUT PT Sarinah (Persero) tanggal 17 Agustus 2014 diselenggarakan piknik bagi seluruh karyawan beserta keluarga pada tanggal 7 September 2014 ke Pasir Mukti. **Kelemahan** • Pelaksanaan *gathering* dengan pemasok **belum** mensosialisasikan kebijakan Perusahaan.				
	141	Informasi yang disediakan dalam *website* Perusahaan dan bumn.go.id dimutahirkan secara berkala.	**Kekuatan** • Berdasarkan penelusuran *assessor*, Informasi yang disajikan dalam *website* PT Sarinah (Persero) dan bumn.go.id telah dimutakhirkan secara berkala. Dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan, Sarinah senantiasa melakukan pembaharuan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi. Selain itu	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,427	100,00%	0,427

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Sarinah juga terus berupaya memperkuat *platform* teknologi informasi untuk menjaga dan meningkatkan kehandalan dalam penyediaan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran melalui *website* www.sarinah.co.id. **Kelemahan** -				
	142	Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam *website* perusahaan.	**Kekuatan** • Berdasarkan penelusuran *assessor*, *website* www.sarinah.co.id mudah diakses dan Informasi yang terdapat dalam *website* dapat diunduh secara mudah. • Tidak terdapat permintaan/ permohonan untuk memperoleh informasi publik yang tidak dipenuhi oleh Perusahaan. **Kelemahan** -	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,572	100,00%	0,572

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
40	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				3,341	84,37%	2,819
	143	Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan.	**<u>Kekuatan</u>** • Laporan Tahunan 2014 Sarinah telah memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan sebagai berikut. 1. Laporan Tahunan 2014 telah disajikan secara bilingual (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris). 2. Laporan tahunan telah dicetak pada kertas yang berwarna terang dan mudah dibaca secara jelas. 3. Laporan Tahunan 2014 telah mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas, terdapat tahun Laporan Tahunan dan identitas perusahaan berupa nama perusahaan (bukan nama	**<u>Hambatan</u>** - **<u>Rekomendasi</u>** • *Corporate Secretary* sebaiknya menyajikan Laporan Tahunan yang dapat diunduh dalam *website* Perusahaan.	0,291	50,00%	0,146

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Group) di samping, halaman belakang (sampul) dan identitas perusahaan di setiap halaman. **Kelemahan** • Laporan Tahunan periode tahun 2009 sampai 2103 telah disajikan dalam *website* Perusahaan dan dapat diunduh. Namun, Laporan Tahunan 2014 **belum** tersedia.				
	144	Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.	**Kekuatan** • Laporan Tahunan 2014 telah menyajikan informasi keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, rasio-rasio keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri perusahaan) dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku 2010-2014. • Laporan Tahunan 2014 tidak memuat informasi harga Saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah Saham	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,073	100,00%	0,073

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			yang diperdagangkan (dicatatkan) untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Hal ini dikarenakan Sarinah belum mencatatkan saham di bursa efek manapun sehingga informasi mengenai ikhtisar saham tidak disampaikan. • Laporan Tahunan 2014 tidak memuat informasi jumlah obligasi atau obligasi konvertibel yang diterbitkan yang masih beredar, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Hal ini dikarenakan Sarinah tidak menerbitkan obligasi, sehingga informasi mengenai ikhtisar obligasi tidak disampaikan. **<u>Kelemahan</u>** -				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	145	Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Laporan Direksi.	**Kekuatan** • Laporan Tahunan 2014 telah memuat Laporan Dewan Komisaris sebagai berikut. 1. Laporan Dewan Komisaris telah memuat penilaian kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan. 2. Laporan Dewan Komisaris telah memuat pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi. 3. Laporan Dewan Komisaris telah memuat perubahan komposisi Dewan Komisaris. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat Laporan Direksi sebagai berikut. 1. Laporan Direksi telah memuat kinerja perusahaan yang mencakup kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi	**Hambatan** - **Rekomendasi** • *Corporate Secretary* sebaiknya memastikan Laporan Dewan Komisaris telah membahas secara spesifik mengenai Komite-Komite yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris.	0,291	91,67%	0,267

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			perusahaan; 2. Laporan Direksi telah memuat prospek usaha; 3. Laporan Direksi telah memuat Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 4. Laporan Direksi telah memuat perubahan komposisi Direksi. Pada tahun 2014, Sarinah telah menunjuk Direksi baru untuk menggantikan Direksi lama yang telah habis masa jabatannya. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat Tanda tangan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut. 1. Tanda tangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah dituangkan dalam lembaran tersendiri. 2. Telah terdapat Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			penuh atas kebenaran isi laporan tahunan. 3. Surat pernyataan tanggung jawab telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Sarinah dengan menyebutkan nama dan jabatannya. 4. Laporan Tahunan telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku bersangkutan. **Kelemahan** • Laporan Dewan Komisaris **belum** membahas secara spesifik mengenai Komite-Komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris.				
	146	Laporan Tahunan memuat profil perusahaan secara	**Kekuatan** • Laporan Tahunan 2014 telah memuat informasi mengenai nama	**Hambatan** -	0,145	94,79%	0,137

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		lengkap	dan alamat Sarinah, kode pos, nomor telepon, nomor *fax, email*, dan *website*. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat Riwayat singkat perusahaan yang mencakup: tanggal/tahun pendirian, nama dan perubahan nama perusahaan. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat bidang usaha Sarinah yang meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat Struktur Organisasi Sarinah. Struktur organisasi dibuat dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat Visi dan Misi Perusahaan yang mencakup: 1. Penjelasan tentang visi perusahaan. 2. Penjelasan tentang misi perusahaan.	**Rekomendasi** • *Corporate Secretary* sebaiknya memastikan bahwa alamat Kantor Akuntan Publik telah dimuat pada Laporan Tahunan Sarinah. • *Corporate Secretary* sebaiknya memastikan bahwa informasi terkait jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa *financial audit* telah dimuat dalam Laporan Tahunan Sarinah.			

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			• Laporan Tahunan 2014 telah memuat nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris yang mencakup informasi terkait umur, pendidikan dan pengalaman kerja. • Laporan Tahunan 2014 telah telah memuat nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Direksi yang mencakup informasi terkait umur, pendidikan dan pengalaman kerja. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat uraian mengenai sumber daya manusia. Uraian tersebut telah memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Pelatihan karyawan yang telah dilakukan; 4. Terdapat persamaan kesempatan kepada seluruh				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			karyawan; 5. Biaya yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan dan latihan (Diklat) karyawan. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat uraian mengenai Komposisi Pemegang Saham sebagai berikut. 1. Tidak terdapat nama pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih Saham, dikarenakan PT Sarinah (Persero) hanya memiliki satu pemegang saham (100%) yaitu Pemerintah Republik Indonesia. 2. Tidak terdapat direktur dan komisaris yang memiliki saham di PT Sarinah (Persero), dikarenakan PT Sarinah (Persero) hanya memiliki satu pemegang saham (100%) yaitu Pemerintah Republik Indonesia. 3. Tidak terdapat pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%,				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			dikarenakan PT Sarinah (Persero) hanya memiliki satu pemegang saham (100%) yaitu Pemerintah Republik Indonesia. • Laporan Tahunan 2014 Sarinah telah memuat Daftar Anak Perusahaan dan atau Perusahaan Asosiasi sebagai berikut. 1. PT Sarinah (Persero) memiliki 2 (dua) entitas anak perusahaan yakni PT Sari Valuta Asing dan PT Sariarthamas Hotel International. 2. PT Sarinah (Persero) memiliki 2 (dua) entitas anak perusahaan, yakni PT Sari Valuta Asing dengan kepemilikan saham sebesar 99% dan PT Sariarthamas Hotel International dengan kepemilikan saham sebesar 50%. 3. PT Sari Valuta Asing bergerak dalam bidang perdagangan valas dan PT Sariarthamas Hotel International bergerak dalam bidang perhotelan (Sari Pan				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Pacific). • Laporan Tahunan 2014 belum memuat uraian Kronologis pencatatan saham dikarenakan Sarinah belum mencatatkan sahamnya di bursa efek. Namun, sebaiknya Sarinah tetap memberikan keterangan mengenai hal ini. Contoh: Sarinah tidak mencatatkan saham di bursa manapun, sehingga tidak dapat memberikan informasi mengenai Kronologis Pencatatan saham. • Laporan Tahunan 2014 belum memuat uraian Kronologis pencatatan Efek lainnya. Dikarenakan Sarinah tidak menerbitkan efek. Namun sebaiknya Sarinah tetap memberikan keterangan mengenai hal ini. Contoh: Sarinah tidak mencatatkan efek lainnya di bursa manapun, sehingga tidak dapat memberikan informasi mengenai				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			kronologis pencatatan efek lainnya. • Laporan Tahunan 2014 Sarinah telah menyajikan informasi terkait Akuntan Perseroan yang mencakup periode audit akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan perusahaan. • Laporan Tahunan 2014 Sarinah telah menyajikan informasi terkait besarnya *fee* audit kantor akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan Sarinah. • Laporan Tahunan 2014 Sarinah telah menyajikan informasi terkait Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional yang mencakup masa berlaku penghargaan/sertifikasi, Nama penghargaan/sertifikasi, tahun perolehan, dan Badan pemberi penghargaan/sertifikasi. • Laporan Tahunan 2014 Sarinah telah mencantumkan Nama dan				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan *(outlet).* **Kelemahan** • Laporan Tahunan 2014 Sarinah **belum** memuat alamat Kantor Akuntan Publik sebagai . • Laporan Tahunan 2014 sarinah **belum** memuat informasi terkait jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa *financial audit.*				
	147	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajamen atas Kinerja Perusahaan.	**Kekuatan** • Laporan Tahunan 2014 telah memuat uraian mengenai tinjauan operasi per segmen usaha, yang meliputi: penjualan/pendapatan usaha; dan profitabilitas untuk masing-masing segmen usaha. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat uraian atas Kinerja keuangan perusahaan yakni analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan	**Hambatan** - **Rekomendasi** • *Corporate Secretary* sebaiknya memastikan Laporan Tahunan memuat informasi terkait ikatan yang material untuk investasi barang modal yang mencakup (1) tujuan dari ikatan tersebut; (2)	1,234	91,18%	1,125

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel) , antara lain mengenai: (1) aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan jumlah aktiva (lampiran Hal 1); (2) kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan jumlah kewajiban (lampiran Hal 2); (3) penjualan/pendapatan usaha; (4) beban usaha; (5) laba/rugi bersih (lampiran hal 3). • Laporan Tahunan 2014 telah memuat bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan antara lain memuat penjelasan tentang: (1) kemampuan membayar hutang; (2) tingkat kolektibilitas piutang. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat Bahasan tentang struktur modal (*capital structure),* kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policies*), dan tingkat liquiditas perusahaan. • Laporan Tahunan 2014 telah mengungkapkan peningkatan atau	sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; (3) mata uang yang menjadi denominasi; (4) langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. • *Corporate Secretary* sebaiknya memastikan Laporan Tahunan memuat informasi terkait besarnya dividen untuk masing-masing tahun untuk 2 tahun buku terakhir dan jumlah *Payout Ratio*.			

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih yang disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan, termasuk dampaknya terhadap kinerja dan resiko usaha di masa mendatang. • Laporan Tahunan 2014 telah				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			memuat uraian tentang prospek usaha perusahaan. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat Informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi hutang/modal, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan pihak afiliasi. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			dampaknya terhadap laporan keuangan. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan. **Kelemahan** • Laporan Tahunan 2014 **belum** membahas informas terkait ikatan yang material untuk investasi barang modal yang mencakup (1) tujuan dari ikatan tersebut; (2) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut: (3) mata uang yang menjadi denominasi; (4) langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. • Laporan Tahunan 2014 **belum** mencatumkan besarnya deviden untuk masing-masing tahun untuk 2				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			tahun buku terakhir dan belum dijelaskan berapa besarnya *Payout Ratio.*				
	148	Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik tata kelola perusahaan yang baik.	**Kekuatan** • Laporan Tahunan 2014 telah memuat uraian Dewan Komisaris yang mencakup: (1) Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; (2) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris; (3) Frekuensi pertemuan; (4)Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat uraian Direksi yang mencakup: (1) Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; (2) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Direksi, yang meliputi gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,944	100,00%	0,944

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			diterima dari perusahaan yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan perusahaan yang bersangkutan; (3) Frekuensi pertemuan; (4) Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan; (5) Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat uraian Komite Audit yang mencakup: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite Audit; (2) Uraian tugas dan tanggung jawab; (3) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Audit; (4) Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit; (5) Independensi anggota Komite Audit. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat uraian Komite Investasi Risiko Usaha mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			hidup singkat anggota Komite Investasi Risiko Usaha; (2) Independensi anggota Komite Investasi Risiko Usaha; (3) Uraian tugas dan tanggung jawab; (4) Uraian pelaksanaan Investasi Risiko Usaha; (5) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Investasi Risiko Usaha. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup antara lain: (1) Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; (2) Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat uraian mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat uraian tentang Unit Audit Internal mencakup antara lain: (1) Informasi tentang keberadaan Unit				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Audit Internal; (2) Penjelasan tentang Piagam Audit Internal; (3) Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan Unit Audit Internal; (5) Nama dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat uraian mengenai manajemen risiko perusahaan mencakup antara lain: (1) Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan (misalnya risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah); (2) Upaya untuk mengelola risiko tersebut. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai "*community development program*" yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang: (1) Mitra Usaha binaan Perusahaan; (2) Program pengembangan pendidikan; (3) Program perbaikan kesehatan; (4) Program pengembangan seni budaya; (5) Biaya yang telah dikeluarkan. • Laporan Tahunan 2014 telah memuat uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan, mencakup antara lain informasi tentang (1) Aktivitas pelestarian lingkungan (2) Aktivitas pengelolaan lingkungan; (3) sertifikasi atas pengelolaan lingkungan; (4) Biaya yang telah dikeluarkan.				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			• Laporan Tahunan 2014 telah mengungkapkan perkara penting yang dihadapi Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat. • Laporan Tahunan 2014 telah mengungkapkan akses informasi dan data perusahaan dalam Laporan Tahunan. • Laporan Tahunan 2014 telah mengungkapkan mengenai Etika Perusahaan yang memuat uraian antara lain: (1) Keberadaan Pedoman Perilaku; (2) Isi Pedoman Perilaku; (3) Penyebaran Pedoman Perilaku kepada karyawan dan upaya penegakannya; (4) Pernyataan mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dimiliki perusahaan. **Kelemahan** -				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	149	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.	**Kekuatan** • Laporan Tahunan 2014 Sarinah telah memuat Laporan Keuangan yang disajikan secara lengkap yang mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta disajikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir. • Laporan Tahunan 2014 Sarinah telah memuat Penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan Bapepam & LK dan/atau institusi yang berwenang. **Kelemahan** • Laporan Tahunan 2014 **belum** mengungkapkan Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan Bapepam. • Laporan Tahunan 2014 **belum**	**Hambatan** - **Rekomendasi** • *Corporate Secretary* sebaiknya memastikan Laporan Tahunan memuat informasi terkait Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan Bapepam. • *Corporate Secretary* sebaiknya memastikan Laporan Tahunan memuat informasi terkait opini akuntan atas laporan keuangan. • *Corporate Secretary* sebaiknya memastikan Laporan Tahunan memuat informasi terkait deskripsi auditor independen di opini antara lain: (1) Nama dan	0,363	35,00%	0,127

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			mengungkapkan opini akuntan atas laporan keuangan adalah wajar tanpa pengecualian. • Laporan Tahunan 2014 **belum** mengungkapkan deskripsi auditor independen di opini antara lain: (1) Nama dan tanda tangan; (2) Tanggal Laporan Audit; (3) Nomor ijin KAP.	tanda tangan; (2) Tanggal Laporan Audit; (3) Nomor ijin KAP.			
41	Perusahaan memperolah penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.				2,904	25,00%	0,726
	150	Perusahaan mengikuti Annual Report Award (ARA).	**Kekuatan** • Sarinah telah berpartisipasi dalam kegiatan *Annual Report Award*. Kategori yang diikuti Sarinah adalah kategori BUMN Non Keuangan *Non Listed* yang diselenggarakan pada tahun 2014.	**Hambatan** - **Rekomendasi** • Direksi sebaiknya mengupayakan untuk memenangkan kegiatan *Annual Report Award.*	1,452	50,00%	0,726

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan • Sarinah **belum** menjadi juara pada kegiatan *Annual Report Award* 2014.				
	151	Perusahaan memperoleh penghargaan atau *award* lainnya.	**Kekuatan** - **Kelemahan** • Sarinah **belum** berpartisipasi dalam kegiatan *Sustainability Reporting Award*. • Sarinah **belum** berpartisipasi dalam kegiatan di bidang publikasi dan keterbukaan informasi sehingga dengan demikian **belum** memperoleh penghargaan di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.	**Hambatan** - **Rekomendasi** • Direksi sebaiknya mempertimbangkan untuk mengikuti kegiatan penghargaan di bidang *Sustainability Report* dan sejenisnya. • Direksi sebaiknya mempertimbangkan untuk mengikuti kegiatan penghargaan di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.	1,452	0,00%	0,000
	JUMLAH ASPEK V				**9,000**	**67,53%**	**6,077**

KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG

PT SARINAH (PERSERO)

ASPEK VI:
ASPEK LAIN

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
42	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau *benchmark* bagi perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia.				5,000	0,00%	0,000
	152	Perusahaan memiliki bidang/area yang menjadi *best practices* di industrinya atau menjadi tujuan *benchmark* bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun perusahaan swasta). Bidang/area tersebut	**Kekuatan** - **Kelemahan** • Perusahaan belum memiliki bidang/area yang menjadi *best practices* di industrinya atau menjadi tujuan benchmark bagi perusahaan lain.	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	0,000%	0,00%	0,000

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		dapat terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, dan strategi.					
43	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.				(5,000)	0,000%	0,000
	153	Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik	.**Praktik** • Tidak terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Sarinah. Sarinah tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, antara lain: 1. Perkara penting berindikasi tindak pidana korupsi yang dihadapi anggota Direksi dan	**Hambatan** - **Rekomendasi** -	(5,000)	0,000%	0,000

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Dewan Komisaris; 2. Pembekuan produk utama perusahaan atau mengalami kondisi yang berpotensi mengakibatkan pembekuan produk utama perusahaan; 3. Pencemaran lingkungan oleh perusahaan yang menyebabkan kematian, menimbulkan kerusakan yang sangat serius pada lingkungan sekitar dan masyarakat, dan kerugian finansial yang sangat besar; 4. Adanya permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, baik yang dilakukan oleh BUMN tersebut maupun oleh kreditur atau oleh instansi yang berwenang; serta 5. Penyimpangan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan lainnya.				

INDIKATOR/PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Kelemahan -				
	JUMLAH ASPEK VI				**5,000**	**0,00%**	**0,000**

DAFTAR CAPAIAN PENERAPAN GCG PER INDIKATOR TAHUN 2014

No.	INDIKATOR	JUMLAH PARAMETER	BOBOT INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2014	
				SKOR	CAPAIAN
I.	**KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN (7%)**				
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).	2	1,218	1,218	100,00%
2	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.	2	1,217	1,217	100,00%
3	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik.	2	0,608	0,608	100,00%
4	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	3	1,370	1,066	77,78%
5	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.	3	1,370	1,370	100,00%

No.	INDIKATOR	JUMLAH PARAMETER	BOBOT INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2014	
				SKOR	CAPAIAN
6	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (*whistleblowing system*).	3	1,217	1,217	100,00%
	Jumlah I	**15**	**7,000**	**6,696**	**95,65%**
II.	**PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL (9%)**				
7	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi .	6	2,423	2,423	100,00%
8	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	5	1,731	1,673	96,66%
9	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	3	1,385	1,385	100,00%

No.	INDIKATOR	JUMLAH PARAMETER	BOBOT INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2014	
				SKOR	CAPAIAN
10	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	6	2,077	1,947	93,75%
11	RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.	2	0,519	0,519	100,00%
12	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.	3	0,865	0,865	100,00%
	Jumlah II	**25**	**9,000**	**8,812**	**97,92%**
III.	**DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS (35%)**				
13	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	2	1,348	1,011	75,00%

No.	INDIKATOR	JUMLAH PARAMETER	BOBOT INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2014	
				SKOR	CAPAIAN
14	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	4	2,127	2,087	98,10%
15	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	2	2,904	2,645	91,07%
16	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	9	9,593	9,318	97,13%
17	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	6	6,479	6,368	98,29%
18	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	2	1,504	0,765	50,88%

No.	INDIKATOR	JUMLAH PARAMETER	BOBOT INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2014	
				SKOR	CAPAIAN
19	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.	3	2,438	2,055	84,28%
20	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	1	0,571	0,286	50,00%
21	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	2	1,659	1,429	86,13%
22	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyeleng-garakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	3	1,349	1,053	78,04%
23	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	4	2,593	2,593	100,00%

No.	INDIKATOR	JUMLAH PARAMETER	BOBOT INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2014	
				SKOR	CAPAIAN
24	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.	5	2,438	2,438	100,00%
	Jumlah III	**43**	**35,000**	**32,047**	**91,55%**
IV.	**DIREKSI (35%)**				
25	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembela-jaran secara berkelanjutan.	2	1,089	0,985	90,48%
26	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	3	1,867	1,400	74,99%
27	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	5	4,044	3,924	97,02%
28	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	11	8,089	7,591	93,84%
29	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	4	3,266	3,266	100,00%
30	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	2	0,778	0,778	100,00%

No.	INDIKATOR	JUMLAH PARAMETER	BOBOT INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2014	
				SKOR	CAPAIAN
31	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan *stakeholders*.	8	6,689	6,553	97,96%
32	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.	2	1,089	1,011	92,86%
33	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.	2	1,089	1,089	100,00%
34	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	5	1,556	1,449	93,11%
35	Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	3	1,711	1,599	93,48%
36	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.	3	1,711	1,684	98,41%
37	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	2	2,022	2,022	100,00%
	Jumlah IV	**52**	**35,000**	**33,351**	**95,29%**

No.	INDIKATOR	JUMLAH PARAMETER	BOBOT INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2014	
				SKOR	CAPAIAN
V.	**PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI (9%)**				
38	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada *stakeholders.*	2	0,435	0,266	61,11%
39	Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.	5	2,320	2,267	97,70%
40	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	7	3,341	2,819	84,37%
41	Perusahaan memperolah penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.	2	2,904	0,726	25,00%
	Jumlah V	**16**	**9,000**	**6,077**	**67,53%**
	Jumlah I + II + III + IV + V	**151**	**95,000**	**86,983**	**82,63%**

No.	INDIKATOR	JUMLAH PARAMETER	BOBOT INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2014	
				SKOR	CAPAIAN
VI.	**ASPEK LAINNYA (5%)**				
42	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia.	1	5,000	0,000	0,00%
43	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.	1	(5,000)	0,000	0,00%
	Jumlah VI	**2**	**5,000**	**0,000**	**0,00%**
	Jumlah I + II + III + IV + V + VI	**153**	**100,000**	**86,983**	**86,98%**

DAFTAR USULAN REKOMENDASI
HASIL PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG TAHUN 2014

No.	Rekomendasi	Pelaksana Tindak Lanjut			
		Pemegang Saham/ Pemilik Modal	Dewan Komisaris	Direksi	Pihak Terkait Lainnya
1.	Pemegang Saham agar menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya.	√			
2.	Pemegang Saham sebaiknya menetapkan sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi secara individual yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.	√			
3.	Pemegang Saham sebaiknya memberikan penilaian Kinerja Direksi secara individu berdasarkan laporan kinerja Direksi.	√			
4.	Pemegang Saham sebaiknya mendorong Perusahaan untuk menyusun Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja Direksi secara individu untuk disahkan/disetujui Pemegang Saham/RUPS.	√	√	√	
5.	Dewan Komisaris agar menyusun kebijakan tentang pelatihan bagi Dewan Komisaris dan menyusun laporan mengenai hasil pelatihan yang telah diikuti.		√		

No.	Rekomendasi	Pelaksana Tindak Lanjut			
		Pemegang Saham/ Pemilik Modal	Dewan Komisaris	Direksi	Pihak Terkait Lainnya
6.	Dewan Komisaris sebaiknya menetapkan pembagian tugas sesuai bidang tugas Direksi.		√		
7.	Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terkait proses persetujuan rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).		√		
8.	Dewan Komisaris sebaiknya memberikan arahan terkait peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajamen risiko perusahaan secara menyeluruh atau tersistem.		√		
9.	Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksaaan sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.		√		
10.	Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap mengenai kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan tersebut.		√		
11.	Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.		√		

No.	Rekomendasi	Pelaksana Tindak Lanjut			
		Pemegang Saham/ Pemilik Modal	Dewan Komisaris	Direksi	Pihak Terkait Lainnya
12.	Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya.		√		
13.	Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, serta terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat dengan pihak ketiga.		√		
14.	Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik membahas atau memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemegang Saham.		√		
15.	Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap terhadap pengelolaan Anak Perusahaan/perusahaan patungan.		√		
16.	Dewan Komisaris agar melakukan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan perusahaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.		√		

No.	Rekomendasi	Pelaksana Tindak Lanjut			
		Pemegang Saham/ Pemilik Modal	Dewan Komisaris	Direksi	Pihak Terkait Lainnya
17.	Dewan Komisaris sebaiknya melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara individu dan menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi tersebut kepada Pemegang Saham/RUPS.		√		
18.	Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terkait pengusulan remunerasi Direksi.		√		
19.	Dewan Komisaris sebaiknya melakukan pembaharuan pernyataan benturan kepentingan setiap tahunnya melalui penandatanganan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.		√		
20.	Dewan Komisaris sebaiknya menyertakan pernyataan benturan kepentingan dalam usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS/Pemilik Modal.		√		
21.	Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terkait penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.		√		
22.	Dewan Komisaris sebaiknya melakukan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris, baik melalui rapat Dewan Komisaris		√		

No.	Rekomendasi	Pelaksana Tindak Lanjut			
		Pemegang Saham/ Pemilik Modal	Dewan Komisaris	Direksi	Pihak Terkait Lainnya
	ataupun lainnya.				
23.	Dewan Komisaris sebaiknya menambahkan ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan evaluasi atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya serta pembahasan atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait usulan Direksi pada bagian rapat Dewan Komisaris dalam *Board Manual* atau pedoman lainnya.		√		
24.	Dewan Komisaris sebaiknya memberikan surat kuasa serta penjelasan secara tertulis jika Dewan Komisaris yang bersangkutan berhalangan hadir dalam rapat.		√		√
25.	Direksi agar memastikan bahwa pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara tepat waktu.			√	√
26.	Direksi agar menyusun rencana kerja terkait pelatihan Direksi secara terinci.			√	
27.	Direksi agar memastikan penyelesaian penyusunan *database* karyawan.			√	
28.	Direksi agar mengupayakan pencapaian target Perusahaan.			√	
29.	Direksi agar mengupayakan pengembangan aplikasi komputer untuk pengukuran kinerja.			√	
30.	Direksi agar mengembangkan KPI individu anggota Direksi berdasarkan KPI Korporat.			√	

No.	Rekomendasi	Pelaksana Tindak Lanjut			
		Pemegang Saham/ Pemilik Modal	Dewan Komisaris	Direksi	Pihak Terkait Lainnya
31.	Direksi agar menyusun *Information Technology Master Plan* (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi.			√	
32.	Direksi agar memastikan dilakukannya audit atas IT di Perusahaan.			√	
33.	Direksi agar melakukan evaluasi efektivitas pendidikan dan pelatihan karyawan.			√	
34.	Direksi agar melakukan survei kepuasan karyawan secara berkala.			√	
35.	Direksi agar membuat surat pernyataan mengenai pengungkapan kepemilikan saham pada perusahaan lain untuk dicatat dalam daftar khusus.			√	
36.	Direksi agar melakukan pembaharuan *Board Manual*, khususnya pada bagian tata tertib rapat Direksi dengan menambahkan tata penyusunan risalah rapat, pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dengan usulan Direksi.			√	
37.	Direksi agar mengupayakan anggota Satuan Pengawas Intern memperoleh sertifikasi profesi CIA/QIA.			√	

No.	Rekomendasi	Pelaksana Tindak Lanjut			
		Pemegang Saham/ Pemilik Modal	Dewan Komisaris	Direksi	Pihak Terkait Lainnya
38.	Direksi sebaiknya membuat kebijakan khusus yang lebih spesifik terkait informasi apa saja yang dikategorikan informasi publik dan informasi rahasia perusahaan; pihak-pihak yang dapat memberikan dan/atau menyampaikan informasi publik; prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada *stakeholders.*			√	
39.	Direksi agar mensosialisasikan kebijakan perusahaan yang relevan kepada pemasok.				
40.	Direksi sebaiknya mengupayakan untuk memenangkan kegiatan *Annual Report Award*.			√	
41.	Direksi sebaiknya mempertimbangkan untuk mengikuti kegiatan penghargaan di bidang transparansi informasi, seperti *sustainability reporting* dan lainnya.			√	
42.	Direksi sebaiknya mempertimbangkan untuk mengikuti kegiatan penghargaan di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.			√	
43.	Satuan Pengawas Intern agar memutakhirkan *Internal Audit Charter.*				√
44.	Satuan Pengawas Intern agar menyusun PKPT dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk based auditing*).				√

No.	Rekomendasi	Pelaksana Tindak Lanjut			
		Pemegang Saham/ Pemilik Modal	Dewan Komisaris	Direksi	Pihak Terkait Lainnya
45.	*Corporate Secretary* agar senantiasa menyusun daftar khusus kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi.				√
46.	*Corporate Secretary* sebaiknya menyajikan Laporan Tahunan yang dapat diunduh dalam *website* Perusahaan.				√
47.	*Corporate Secretary* sebaiknya memastikan Laporan Tahunan memuat: a. Komite-Komite yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris dalam Laporan Dewan Komisaris; b. Memuat alamat Kantor Akuntan Publik; c. Informasi terkait jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa *financial audit*; d. Informasi terkait ikatan yang material untuk investasi barang modal yang mencakup (1) tujuan dari ikatan tersebut; (2) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, (3) mata uang yang menjadi denominasi, (4) langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; e. Informasi terkait besarnya dividen untuk masing-masing tahun untuk 2 tahun buku terakhir dan jumlah *Payout Ratio;* f. Informasi terkait Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;				√

No.	Rekomendasi	Pelaksana Tindak Lanjut			
		Pemegang Saham/ Pemilik Modal	Dewan Komisaris	Direksi	Pihak Terkait Lainnya
	g. Opini akuntan atas Laporan Keuangan; h. Deskripsi auditor independen di opini antara lain: (1) Nama dan tanda tangan; (2) Tanggal Laporan Audit; (3) Nomor ijin KAP.				

TRISAKTI GOVERNANCE CENTER

Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti
Kampus A, Gedung S Lantai 5, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta
Telp. (0882) 11863979
Faks. (021) 5644270